LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

TAHUN 2011 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan kemandirian daerah, dipandang perlu untuk dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

c. bahwa penetapan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

d. bahwa ketentuan mengenai retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang ,Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5107);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 7/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

}

6. Bupati adalah Bupati Bekasi.

7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah BPPT Kabupaten Bekasi.

8. Kas Daerah adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

9. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh setiap orang atau Badan.

11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau Badan.

15. Golongan retribusi daerah adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

16. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang atau Badan.

17. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

18. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada setiap orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

19. Wajib retribusi adalah setiap orang atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari peng himpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

25. Setiap orang adalah orang pribadi atau badan.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal2

Jenis retribusi adalah:

a. jasa umum;
b. jasa usaha; dan
c. perizinan tertentu.

Pasal3

Jenis retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah:
a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
f. retribusi pelayanan pasar;
g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
h. retribusi pemerik saan alat pemadam kebakaran;
i. retribusi penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan;
j. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
k. retribusi pengolahan limbah cair
l. retribusi pelayanan pendidikan;
m. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal4

(1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehtan.

(2) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

(3) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan administrasi.

(4) Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

(5) Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(6) Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar.

(7) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(8) Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran serta pelayanan lain oleh Pemerintah Daerah.

(9) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan.

(10) Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedian dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(11) Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah.

(12) Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaranpendidikan dan pelatihan teknis.

(13) Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggu naan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal5

Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah:

a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. retribusi rumah potong hewan;
c. retribusi pelayanan terminal;
d. retribusi tempat khusus parkir;
e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

Pasal6

(1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikelola Daerah.

(2) Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas dan pemeriksaan (antemortem dan postmortem) di rumah potong hewan.

(3) Dengan nama retribusi pelayanan terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

(4) Dengan nama retribusi pelayanan tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan oleh raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal7

Jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah:

a. retribusi izin mendirikan bangunan (IMB);
b. retribusi izin gangguan;
c. retribusi izin trayek;
d. retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 8

(1) Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan IMB.

(2) Dengan nama retribusi izin ganggugan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan izin gangguan.

(3) Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan izin trayek.

(4) Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penerbitan izin usaha perikanan.

BAB III

OBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Obyek Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

(1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Keliling Puskesmas Pembantu, Puskesmas rawat inap, laboratorium kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. pelayanan pendaftaran;
   b. pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas rawat inap dan Puskesmas Sore bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.
   c. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 10

(1) Obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi kegiatan pengambilan/

pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah danpenyediaan lokasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catata Sipil

Pasal 11

Obyek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah pelayanan:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. kartu keterangan bertempat tinggal;
c. kartu identitas penduduk musiman;
d. kartu keluarga;
e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akta kematian.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 12

(1) Obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:
   a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan;
   b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat dan penitipan mayat/jenazahdi rumah duka yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan bagi masyarakat miskin Kabupaten Bekasi.

Paragraf 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 13

Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pelayanan penyediaan empat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 14

1) Obyek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 7

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

(1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, mobil penumpang pribadi dan sepeda motor.

Paragraf 8

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 16

Obyek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penaggulangan kebakaran, alat penyelamatan jiwa serta alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran adan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Paragraf 9

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta MasteRplan/Siteplan

Pasal 17

Obyek retribusi penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 18

(1) Obyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, adalah pelayanan penyedian dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi penyediaan dan /atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 11

Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal19

(1) Obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, adalah pelayanan pengolahan limbah cair

rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pengolahan limbah cair sebagai mana dimaksud pada ayat (1), adalah pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau saran pembuangan lainnya.

Paragraf 12

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal20

(1) Obyek retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I, adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselengga rakan oleh Pemerintrah Daerah;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 13

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 21

Obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, kemananan dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Obyek Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 22

(1) Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah pemakaian kekayaan daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kekayaan daerah berupa tanah dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Pasal23

(1) Obyek retribusi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 3

Retribusi Terminal

Pasal 24

(1) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah pelayanan penyediaan jalur pemberangkatan, jalur kedatangan, lintasan, tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, kendaraan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitasi lainnya di lingkungan terminal yang disdiakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 4

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

(1) Obyek retribusi tempat khsusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi tempat khsusu parkir sebagai. mana dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 26

(1) Obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Obyek Retribusi Perizinan

Paragraf 1

Retribusi IMB

Pasal27

(1) Obyek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi:

a. kegiatan pemeriksaan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana ateknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), Koefisien ketinggian bangunan (KKB); dan
b. pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi bangunan tersebut.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
b. pemberian IMB untuk bangunan-bangunan yang digunakan untuk sarana ibadah, bangunan asrama yatim piatu, majelsi taklim, pondok pesantren dan sejenisnya.

Paragraf 2

Retribusi Izin Gangguan

Pasal28

(1) Obyek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, adalah pemberian izin usaha /kegiatan kepada setiap orang yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamtan kerja.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentuk an oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Retribusi Izin Trayek

Pasal29

Obyek retribusiizin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah pemberian izin kepada setiap orang untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Paragraf 4

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 30

Obyek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah pemberian izin kepada setiap orang utnuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

BAB IV

SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal31

(1) Subyek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap orang yang menggunakan/menikmati p elayana jasa umum yang bersangkutan.

(2) Wajib retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi jasa umum.

Pasal 32

(1) Subyek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah setiap orang yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

(2) Wajib retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi jasa umum.

Pasal 33

(1) Subyek retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah setiap orang yang memperoleh izin yang bersangkutan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi perizinan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Umum

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis pelayanan/tindakan kesehtan, pemakaian alat, dan obat-obatan serta jangka waktu perawatan.

Pasal 35

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan klasifikasi perkiraan volume sampah yang dapat dikumpulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan intensitas kegiatan usaha.

(2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan, rumah tangga, perdagangan dan industri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi perkiraan volume sampah sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BUpati.

Pasal36

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dihitung berdasarkan jumlah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan mulai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jumlah mayat/jenazah yang dimakamkan dan tempat serta jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 38

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur dengan menggunakan zona tempat, jenis kendaraan, sifat dan waktu penggunaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan atas letak, zona tempat, kelas pasar, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarkan fasilitas pasar.

Pasal40

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan jumlah berat diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor.

Pasal41

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah, jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta masterplan/ siteplan diukur berdasarkan pelayanan pengukuran, pembuatan gambar dan pencetakan peta.

Pasal43

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditentukan berdasakan jenis pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kaskus yang diperoleh.

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair ditentukan berdasarkan pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang diberikan.

Pasal45

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan pendidikan yang diberikan jangka waktu dan frekuensi pendidikan.

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomununtuk melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha

Pasal47

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan:

a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukkannya;

b. pemakaian lapangan olah raga didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peuntukkanya;
c. pemakaian ruang di atas saluran pada lokasi dan luasnya;
d. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukkannya;
e. pemakaian kios/los di atas tanah Pemerintah Daerah didasarkan pada lokasi luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukkanya;
f. pemakaian laboratorium didasarkan atas jenis alat, bahan, waktu pemakaian dan peruntukkannya;
g. pemakaian insenerator atau pembakaran sampah medis didasarkan pada volume sampah yang dimusnahkan;
h. pemakaian kendaraan didasarkan atas jarak tempuh, waktu pemakaian dan peruntukkannya;
i. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaian dan peruntukkannya;
j. pemakaian kolam ikan didasarkn pada luas kolam, waktu penggunaan, dan fasilitasnya;
k. pemakaian depo ikan didarkan pada biaya operasional dan biaya perawatan;
l. pemakaian pasar ikan didasarkan pada luas kios/los, waktu penggunaan dan fasilitasnya.

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa RPH diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang dipotong.

Pasal49

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, jenis pelayanan dan jenis kendaraan.

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir berdasarkan klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan dan waktu penggunaan berdasarkan tarif progresif.

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan jumlah frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Bagian Ketiga

Retribusi Perizinan

Pasal 52

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan menggunakan faktor luas lantai bangunan, jumlah lantai bangunan dan fungsi bangunan.

(2) Faktor luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bobot koefisien.

(3) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien.

Pasal53

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruangan tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tarif dasar retribusi izin gangguan.

Pasal54

(1) Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

(2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek dan wilayah operasi yang diatu dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan pada tujuan untuk pembiayaan pembangunan dan penyediaan saran, biaya operasional serta biaya lelang.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 56

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

(4) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal57

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut di lakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal58

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penye lenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaran pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 59

(1) Penghitungan retribusi dilakukan dengan rumus:

retribusi = tingkat penggunaan jasa × tarif retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan:
a. nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan;
b. dapat ditentukan seragam atau diadakan pembedaan sesuai prinsip dan sasaran tarif.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Sore

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore, adalah sebagai berikut:

a. retribusi pelayanan rawat jalan per pasien setiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore bagi masyarakat di luar Kabupaten Bekasi dan UPTD Kesehatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

1.	pelayanan kesehatan dasar pagi	Rp	5.000,-
2.	pelayanan kesehatan dasar sore	Rp	7.500,-
3.	pelayanan dokter spesialis pagi	Rp	10.000,-
4.	pelayanan dokter spesialis sore	Rp	15.000,-
5.	pelayanan 24 jam (UGD)	Rp	15.000,-

b. Retribusi pelayanan rawat inap di Puskesmas DTP bagi masya rakat di luar Kabupaten Bekasi per pasien per hari ditetapkan sebesar (visite+akomodasi+obat Puskesmas) Rp 75.000,-.

c. Retribusi jasa tindakan medik umum di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore bagi masyarakat di luar Kabupaten Bekasi dan UPTD Kesehatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. perawatan luka tanpa jahitan	Rp	5.000,-
2. perawatan luka sampai dengan 5 jahitan	Rp	7.500,-
3. luka lebih dari 5 jahitan, setiap jahitan ditambah	Rp	1.000,-
4. perawatan luka bakar derajat i - ii luas < 25%	Rp	6.000,-
5. perawatan luka bakar derajat i - ii luas 25%- 50%	Rp	10.000,-
6. dilatasi penis pada phimosis	Rp	10.000,-
7. sirkumcisi (s/d perawatan selama 1 minggu)	Rp	50.000
8. incisi absesRp 7.500,-		
9. explorasi coRpus alienum	Rp	25.000,-
10. exteRpasi (lipoma, atheroma, dll)	Rp	25.000,-
11. extraksi kuku	Rp	10.000,-
12. fungsi pleura (Puskesmas DTP) 1 kali fungsi	Rp	15.000,-
13. pasang infus (hanya pemasangan pertama)	Rp	5.000,-
14. pasang implan	Rp	5.000,-
15. lepas implan	Rp	20.000,-
16. pasang/lepas IUD	Rp	5.000,-
17. visum luar	Rp	5.000,-
18. venaseksi	Rp	20.000,-
19. swab vagina	Rp	5.000,-

d. Retribusi jasa tindakan medik gigi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore bagi masyarakat di luar Kabupaten Bekasi dan UPTD Kesehatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Pencabutan gigi susu per gigi	Rp	2.500,-
2. Pencabutan gigi tetap per gigi	Rp	5.000,-
3. Pencabutan gigi dengan komplikasi per gigi	Rp	7.500,-
4. Penambalan sementara per gigi	Rp	2.500,-
5. Penambalan amalgam, composif per gigi	Rp	5.500,-

6. Penambalan dengan sinar per gigi	Rp	30.000,-
7. Pembersihan karang gigi per regio	Rp	5.000,-
8. Alveolectomi	Rp	10.000,-
9. Operculectomi	Rp	10.000,-
10. Incisi dental Abses	Rp	5.000,-
11. Odontectomi	Rp	15.000,-

e. Retribusi jasa pelayanan tindakan persalinan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore bagi masyarakat di luar Kabupaten Bekasi dan UPTD Kesehatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Pertolongan oleh Dokter Spesialis	Rp 300.000,-
2. Pertolongan oleh Dokter Umum	Rp 250.000,-
3. Pertolongan oleh Bidan	Rp 200.000,-

f. Retribusi jasa pelayanan pemeriksaan (keuring) untuk maksud tertentu di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliiing, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore bagi masyarakat di luar Kabupaten Bekasi dan UPTD Kesehatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Melanjutkan pendidikan	Rp	5.000,-
2. Melamar pekerjaan	Rp	5.000,-
3. Mendapat izin mengemudi	Rp	5.000,-
4. Kepentingan asuransi jiwa	Rp	5.000,-
5. Persyaratan PNS/TNI/Polri	Rp	5.000,-

g. biaya pemeriksaan calon jemaah haji di tingkat:

1. Puskesmas	Rp 50.000,-
2. Kabupaten	Rp 100.000,-

h. retribusi jasa penggunaan mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut:

1. lima Km pertama (PP) dihitung seharga 15 liter Premium;
2. lima Km selanjutnya (PP) dihitung seharga 2 liter Premium;
3. untuk tujuan luar daerah yang harus menginap, biaya penginapan dan makan pengemudi serta pembantu pengemudi menjadi tanggung jawab penyewa;
4. pengangkutan korban kecelakaan dan orang sakit yang tidak mampu atas permintaan Polri, Pemerintah Daerah untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya.

i. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore bagi masyarakat di luar Kabupaten Bekasi, Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Kesehatan Kerja

1. Laboratorium Klinik
Kelompok 1
Darah :

a. Darah Rutin	Rp	20.000,-
b. Hemoglobin	Rp	5.000,-
c. Hematokrit	Rp	5.000,-
d. Leukosit	Rp	5.000,-
e. Hitung Jenis Leukosit	Rp	5.000,-
f. Eritrosit	Rp	5.000,-
g. Trombosit	Rp	5.000,-
h. LED	Rp	5.000,-
i. Retikulosit	Rp	5.000,-
j. VER/HER/KHER	Rp	5.000,-
k. Eosinofil	Rp	5.000,-
l. Masa Pembekuan	Rp	5.000,-

m.	Masa Perdarahan	Rp	5.000,-
n.	Percobaan Pembendungan	Rp	5.000,-
o.	Retraksi Bekuan	Rp	5.000,-
p.	Malaria	Rp	5.000,-
q.	Golongan Darah	Rp	5.000,-
r.	Trombosit	Rp	5.000,-

Urine :

a.	Urine Rutin (Makros + 10 parameter)	Rp	11.000,-
b.	Urine Lengkap (Rutin + Sedimen)	Rp	21.000,-
c.	Reduksi Urine	Rp	4.000,-
d.	Protein Kuantitatif	Rp	12.000,-
e.	Protein Bence Jones	Rp	12.000,-
f.	Warna	Rp	4.000,-
g.	Kejernihan	Rp	4.000,-
h.	PH	Rp	4.000,-
i.	Berat Jenis	Rp	4.000,-
j.	Sedimen	Rp	4.000,-
k.	Bilirubin	Rp	4.000,-
l.	Urobilinogen	Rp	4.000,-
m.	Darah	Rp	4000,-
n.	Keton	Rp	4.000,-
o.	Nitrit	Rp	4.000,-

Faeces:

a.	Faeces Rutin (Makros + Mikros)	Rp	9.000,-
b.	Faeces Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	Rp	12.000,-
c.	Darah Samar	Rp	12.000,-
d.	Warna	Rp	4.000,-
e.	Konsistensi	Rp	4.000,-
f.	Darah	Rp	4.000,-

g. Lendir	Rp.	4.000,-
h. Leukosit	Rp	4.000,-
i. Eritrosit	Rp	4.000,-
j. Sisa Makanan	Rp	4.000,-
k. Parasit	Rp	4.000,-
l. Bakteri	Rp	4.000,-
m. Jamur	Rp	4.000,-
Kelompok 2		
Pemeriksaan Jamur (KOH)	Rp	3.000,-
Kelompok 3 (Kimia Darah - Gula Darah)		
Gula Darah Puasa	Rp	9.000,-
Gula Darah 2 jam PP	Rp	9.000,-
Gula Darah sewaktu	Rp	9.000,-
Kelompok 4		
Pemeriksaan test kehamilan	Rp	10.000,-
Sediaan Gram, GO	Rp	10.000,-
Sediaan BTA	Rp	20.000,-
Kelompok 5 (Kimia darah/Fungsi hati/prolipid/fungsi ginjal)		
Bilirubin Total	Rp	20.000,-
Protein Total	Rp	20.000,-
Albumin	Rp	20.000,-
Globulin	Rp	20.000,-
SGOT	Rp	20.000,-
Alkali Fosfatase	Rp	20.000,-
Gamma GT	Rp	20.000,-
Kolesterol Total	Rp	20.000,-
Trigliserida	Rp	20.000,-
HDL/LDL	Rp	20.000,-
Ureum	Rp	20.000,-
Cretinin	Rp	20.000,-
Asam Urat	Rp	20.000,-

Pemeriksaan (Kimia Darah - Imunologi/Serologi

HbsAg	Rp	20.000,-
Anti HbsAg	Rp	20.000,-
HSVIgG	Rp	35.000,-
HSVIgM	Rp	35.000,-
Anti HSV IgG	Rp	35.000,-
Anti HSV IgM	Rp	35.000,-
Dengue Blot IgG	Rp	45000,-
Dengue Blot IgM	Rp	45.000.-
TPHA	Rp	20.000,-
Widal	Rp	20.000,-
Asto	Rp	20.000,-
VDRL	Rp	20.000,-
Pap Smear	Rp	20.000,-

Kelompok 6 (test Ketergantungan Obat)

Benzodiazepin	Rp	30.000,-
MoRPHin/opiat	Rp	30.000,-
Marijuana	Rp	30.000,-

Kelompok 7

T3	Rp	50.000,-
T4	Rp	50.000,-
TSH	Rp	50.000,-

1. Radiodiagnostik

Kelompok 1

Thorax	Rp	36.000,-
Kepala	Rp	36.000,-
Ekstremitas atas	Rp	36.000,-
Ekstremitas bawah	Rp	36.000,-
Columna Vertebralis	Rp	36.000,-
Abdomen Satu Posisi	Rp	36.000,-.

Pelvis Satu Posisi	Rp	36.000,-
Jaringan Lunak	Rp	36.000,-
Panoramic	Rp	36.000,-
Gigi Biasa	Rp	36.000,-
Kelompok 2		
BNC -IVP	Rp	170.000,-
Appendikogram	Rp	120.000,-
Hysterosalpingografi (HSG)	Rp	112.000,-
Mammografi	Rp	45.000,-
Abdomen Tiga Posisi	Rp	80.000,-
1. Elektromedika		
Kelompok 1		
E K G	Rp	30.000,-
Kelompok 2		
U S G	Rp	50.000,-
Kelompok 3		
USG+Film	Rp	60.000,-
Kelompok4		
CTG	Rp	80.000,-
Kelompok 5		
Treadmill Test	Rp	160.000,-
2. Elektromedika Kesling Pemeriksaan Air		
Air Bersih Bakteriologi	Rp	25.000,-
Air Bersih Kimia	Rp	25.000,-
Air Kolam Renang	Rp	15.000,-
Air Limbah	Rp	100.000,-

3. Pemeriksaan Makanan Rp 100.000,-

Biaya transport pengambilan dan pengamatan bahan pemeriksaan air dan atau makanan ke lokasi setiap kali pemeriksaan ditentukan sebesar biaya transport pergi pulang.

Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kerja di UPTD Kesehatan Kerja adalah:

1. Spirometri Rp 60.000,-
2. Audiometri Rp 60.000,-
3. Konsultasi Kasus K3 Rp 250.000,-
4. Pengukuran Tingkat Kebisingan tanpa Analisis Frekwensi per titik Rp 150.000,-
5. Pengukuran Pencahayaan per titik Rp 150.000,-
6. Pengukuran Kadar Debu Total di tempat kerja per titik Rp 240.000,-
7. Pendeteksian Gas di tempat kerja per jenis gas dalam 1 titik Rp 220.000,-
8. Pengukuran Kualitas Udara dalam gedung per jenis udara dalam 1 titik Rp 170.000,-
9. Pengukuran Kecepatan Angin per titik Rp 170.000,-
10. Penilaian Risiko Tempat Kerja per jam Rp 500.000,-
11. Analisis Hasil dan Laporan Penilaian Risiko Lingkungan Tempat Kerja Rp 1.000.000,-
12. Penyuluhan Kesehatan Kerja Rp 300.000,-
13. Pemeriksaan Medical Check Up:

- Paket Standat Rp 110.000,-
  Anamnesa, pemeriksaan fisik, darah lengkap, Urine lengkap

- Paket A — Rp 220.000,-
  Anamnesa, pemeriksaan fisik, darah lengkap, urine lengkap, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, rontgen, EKG

- Paket B — Rp 280.000,-
  Anamnesa, pemeriksaan fisik, darah lengkap, urine lengkap, feces lengkap, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, serologi, rontgen, EKG

- PaketC — Rp 370.000,-
  Anamnesa, pemeriksaan fisik, darah lengkap, urine lengkap, feces lengkap, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, screening Hepatitis B, rontgen, EKG, Audiometri

- Paket D — Rp 320.000,-
  Anamnesa, pemeriksaan fisik, darah lengkap, urine lengkap, feces lengkap, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, screening Hepatitis B, rontgen, EKG

- Paket E — Rp 360.000,-
  Anamnesa, pemeriksaan fisik, darah lengkap, urine lengkap, feces lengkap, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, screening Hepatitis B, rontgen, EKG, Spirometri

- Paket F — Rp 335.000,-
  Anamnesa, pemeriksaan fisik, darah lengkap, urine lengkap, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, rontgen, EKG, Audiometri, pemeriksaan mata

Pasal 61

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut:

a. tarif pelayanan klinik rawat jalan

No	Jenis pelayanan	Jasa Saranan	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Umum	5.000	5.000	10.000
2	Spesialis (spes gimul & gizi)	5.000	15.000	20.000
3	Gizi & mulut non spesialis	5.000	5.000	10.000
4	Gizi (oleh tenaga gizi)	5.000	3.000	8.000
5	Rujukan antar klinik spesialis	5.000	15.000	15.000
6	Rujukan ke tenaga gizi	5.000	3.000	3.000

b. tarif pelayanan ruangan rawat inap/ hari

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
2	Kelas II	60.000	30.000	90.000
3	Kelas I	130.000	50.000	180.000
4	ICU	250.000	100.000	350.000

c. tarif pelayanan visite dokter/ hari

No	Kelas	Jasa Pelayanan Spesialis	Jasa Pelayanan Dokter Umum
1	Kelas III	20.000	5.000
2	Kelas II	30.000	10.000
3	Kelas I	40.000	15.000
4	ICU	75.000	25.000

d. tarif pelayanan one day care

Besarnya tarif *one day care* disesuaikan dengan tarif rawat inap kelas I

e. tarif tindakan medik dan terapi

1. rawat darurat shift I (pukul 08.00 – 14.00):

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Dokter Umum	10.000	10.000	20.000
2	Rujukan spesialis di tempat	-	20.000	20.000
B	Medik Non Operatif			
1	Nebuliser	10.000	6.000	16.000
2	Resusitasi sederhana	7.000	13.000	20.000
3	RKP + Intubasi	12.000	18.000	30.000
4	RKP + Intubasi + Ventilator	20.000	25.000	45.000
5	RKP + Defibrilator	70.000	30.000	100.000
C	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	7.000	8.000	15.000
2	Sederhana khusus	16.000	20.000	36.000
3	Kecil	25.000	35.000	60.000
4	Kecil khusus	50.000	60.000	110.000

2. rawat dadurat shift II dan III (pukul 14.00 – 08.00)

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Dokter Umum	10.000	10.000	20.000
2	Rujukan spesialis di tempat	-	20.000	20.000
B	Medik Non Operatif			
1	Nebuliser	12.500	7.500	20.000
2	Resusitasi sederhana	8.750	16.250	25.000
3	RKP + Intubasi	15.000	23.000	38.000
4	RKP + Intubasi + Ventilator	25.000	32.000	57.000
5	RKP + Defibrilator	87.500	37.500	125.000
C	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	9.000	10.000	19.000
2	Sederhana khusus	20.000	25.000	45.000
3	Kecil	31.250	43.750	75.000
4	Kecil khusus	63.000	75.000	138.000

3. THT Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Diagnostik sederhana	8.000	10.000	-	18.000
2	Diagnostik khusus I	15.000	25.000	-	40.000
3	Diagnostik khusus II	25.000	35.000	-	60.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	12.000	-	20.000
2	Sedang	20.000	20.000	-	40.000
3	Sedang khusus	30.000	50.000	-	80.000
C	Operatif Narkosis				
1	Kecil	50.000	150.000	50.000	250.000
2	Sedang	75.000	250.000	85.000	410.000
3	Sedang khusus	100.000	350.000	110.000	560.000
4	Besar	150.000	450.000	150.000	750.000
5	Besar khusus	200.000	675.000	225.000	1.100.000

4.. THT kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A.	Pemeriksaan				
1	Diagnostik sederhana	8.000	12.000	-	20.000
2	Diagnostik khusus I	15.000	32.000	-	47.000
3	Diagnostik khusus II	25.000	44.000	-	69.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	15.000	-	23.000
2	Sedang	20.000	25.000	-	45.000
3	Sedang khusus	30.000	63.000	-	93.000
C	Operatif Narkosis				
1	Kecil	100.000	187.000	63.000	350.000
2	Sedang	150.000	340.000	120.000	610.000
3	Sedang khusus	200.000	470.000	165.000	835.000
4	Besar	250.000	625.000	215.000	1.090.000
5	Besar khusus	375.000	950.000	330.000	1.655.000

5. THT Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Diagnostik sederhana	10.000	16.000	-	26.000
2	Diagnostik khusus I	19.000	39.000	-	58.000
3	Diagnostik khusus II	31.000	55.000	-	86.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	10.000	19.000	-	29.000
2	Sedang	25.000	32.000	-	57.000
3	Sedang khusus	37.000	78.000	-	115.000
C	Operatif Narkosis				
1	Kecil	175.000	390.000	135.000	700.000
2	Sedang	275.000	700.000	245.000	1.220.000
3	Sedang khusus	350.000	1.000.000	350.000	1.700.000
4	Besar	450.000	1.300.000	450.000	2.200.000
5	Besar khusus	650.000	2.000.000	650.000	3.300.000

6. kebidanan dan kandungan kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Khusus	25.000	75.000	-	100.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	17.000	-	25.000
2	Sedang	20.000	25.000	-	45.000
3	Khusus	25.000	45.000	-	70.000
C	Operatif Narkosis				
1	Sedang	75.000	250.000	85.000	410.000
2	Sedang khusus	100.000	350.000	110.000	560.000
3	Besar	150.000	450.000	150.000	750.000
4	Besar khusus	200.000	675.000	225.000	1.100.000
D	Persalinan Normal				
1	Bidang	60.000	100.000	-	160.000
2	Dokter umum	60.000	140.000	-	200.000
3	Dokter spesialis	60.000	210.000	-	270.000
E	Persalinan Patologis				
1	Vacum/ Forcep/ Induksi	60.000	275.000	-	335.000
2	Manual Placenta	60.000	75.000	-	135.000

c.2. Kebidanan dan Kandungan Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Khusus	25.000	95.000	-	120.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	8.000	22.000	-	30.000
2	Sedang	20.000	32.000	-	52.000
3	Khusus	30.000	50.000	-	80.000
C	Operatif Narkosis				
1	Sedang	150.000	340.000	120.000	610.000
2	Sedang khusus	200.000	470.000	165.000	835.000
3	Besar	250.000	625.000	220.000	1.095.000
4	Besar khusus	375.000	950.000	330.000	1.655.000
D	Persalinan Normal				
1	Bidang	60.000	125.000	-	185.000
2	Dokter umum	60.000	175.000	-	235.000
3	Dokter spesialis	60.000	260.000	-	320.000
E	Persalinan Patologis				
1	Vacum/ Forcep/ Induksi	60.000	345.000	-	405.000
2	Manual Placenta	60.000	95.000	-	155.000

c.3. Kebidanan dan Kandungan Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Khusus	30.000	120.000	-	150.000
B	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	10.000	30.000	-	40.000
2	Sedang	25.000	40.000	-	65.000
3	Khusus	35.000	65.000	-	100.000
C	Operatif Narkosis				
1	Sedang	275.000	700.000	245.000	1.220.000
2	Sedang khusus	350.000	1.000.000	350.000	1.700.000
3	Besar	450.000	1.300.000	450.000	2.200.000
4	Besar khusus	650.000	2.000.000	650.000	3.300.000
D	Persalinan Normal				
1	Bidang	75.000	155.000	-	230.000
2	Dokter umum	75.000	215.000	-	290.000
3	Dokter spesialis	75.000	325.000	-	400.000
E	Persalinan Patologis				
1	Vacum/ Forcep/ Induksi	75.000	425.000	-	500.000
2	Manual Placenta	75.000	125.000	-	200.000

d.1. Paru Kelas Iii

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Sederhana	5.000	4.000	9 000
2	Khusus	16.000	11.000	27.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	5.000	4.000	9.000
2	Sedang	10.000	6.000	16.000
3	Besar	16.000	11.000	27.000
4	Canggih	37.000	25.000	62.000
5	Khusus	62.000	125.000	187.000

d.2. Paru Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Sederhana	5.000	5.000	10.000
2	Khusus	16.000	14.000	30.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	5.000	5.000	10.000
2	Sedang	10.000	8.000	18.000
3	Besar	16.000	14.000	30.000
4	Canggih	37.000	33.000	70.000
5	Khusus	62.000	158.000	220.000

d.3. Paru Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Sederhana	6.500	6.500	13.000
2	Khusus	20.000	18.000	38.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	6.500	6.500	13.000
2	Sedang	12.500	10.500	23.000
3	Besar	20.000	18.000	38.000
4	Canggih	46.000	42.000	88.000
5	Khusus	77.000	198.000	275.000

e. 1. Mata Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Sederhana	8.000	15.000	-	23.000
2	Khusus	25.000	30.000	-	55.000
B	Medik Non Operatif				
1	Sederhana	15.000	25.000	-	40.000
C	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	40.000	60.000	-	100.000
2	Sedang	70.000	100.000	-	170.000
3	Sedang khusus	125.000	235.000	-	360.000
4	Besar	180.000	360.000	-	540.000
5	Besar khusus	225.000	450.000	-	675.000
D	Operatif Narkosis				
1	Besar	150.000	450.000	150.000	750.000
2	Besar khusus	200.000	675.000	225.000	1.100.000

e. 2. Mata Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Sederhana	8.000	19.000	-	27.000
2	Khusus	25.000	38.000	-	63.000
B	Medik Non Operatif				
1	Sederhana	15.000	32.000	-	47.000
C	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	45.000	82.000	-	127.000
2	Sedang	80.000	138.000	-	218.000
3	Sedang khusus	150.000	312.000	-	462.000
4	Besar	200.000	500.000	-	700.000
5	Besar khusus	250.000	625000	-	675.000
D	Operatif Narkosis				
1	Besar	250.000	625.000	220.000	1.095.000
2	Besar khusus	375.000	950.000	330.000	1.655000

e. 3.Mata Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Pemeriksaan				
1	Sederhana	10.000	24.000	-	34.000
2	Khusus	32.000	48.000	-	80.000
B	Medik Non Operatif				
1	Sederhana	19.000	40.000	-	59.000
C	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	85.000	17.000	-	255.000
2	Sedang	150.000	290.000	-	440.000
3	Sedang khusus	280.000	640.000	-	920.000
4	Besar	375.000	1.025.000	-	1.400.000
5	Besar khusus	450.000	1300.000	-	1.750.000
D	Operatif Narkosis				
1	Besar	450.000	1.300.000	450.000	2.200.000
2	Besar khusus	650.000	2.000.000	650.000	3.300.000

f.1. Anak Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Khusus	10.000	15.000	25.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	1.500	2.500	4.000
2	Sedang	10.000	6.000	16.000
3	Sedang khusus	2.000	500	2.500
4	Besar	10.000	60.000	70.000

f.2. Anak Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Khusus	10.000	19.000	29.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	1.500	3.500	5.000
2	Sedang	10.000	8.000	18.000
3	Sedang khusus	2.000	625	2.625
4	Besar	10.000	75.000	85.000

f.3. Anak Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Pemeriksaan			
1	Khusus	12.500	23.500	36.000
B	Medik Non Operatif			
1	Kecil	2.000	4.500	6.500
2	Sedang	12.000	10.000	22.000
3	Sedang khusus	2.500	800	3.300
4	Besar	12.500	93.500	106.000

g.1. Kulit Kelamin Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	8.000	8.000	16.000
2	Sederhana khusus	20.000	20.000	40.000
3	Kecil	30.000	60.000	90.000

g.2. Kulit Kelamin Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	8.000	10.000	18.000
2	Sederhana khusus	20.000	25.000	45.000
3	Kecil	30.000	75.000	105.000

g.3. Kulit Kelamin Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	10.000	13.000	23.000
2	Sederhana khusus	25.000	31.000	56.000
3	Kecil	38.000	94.000	132.000

h.1. Rehabilitasi Medik Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	10.000	6.000	16.000
2	Sederhana khusus	20.000	12.000	32.000
3	Kecil	25.000	16.000	41.000
4	Kecil khusus	8.000	20.000	28.000

h.2. Rehabilitasi Medik Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	10.000	8.000	13.000
2	Sederhana khusus	20.000	15.000	35.000
3	Kecil	25.000	20.000	45.000
4	Kecil khusus	8.000	25.000	33.000

h.3. Rehabilitasi Medik Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Operatif Non Narkosis			
1	Sederhana	12.000	10.000	22.000
2	Sederhana khusus	25.000	19.000	44.000
3	Kecil	31.000	25.000	56.000
4	Kecil khusus	10.000	31.000	41.000

i.1. Bedah Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	30.000	60.000	-	90.000
2	Kecil khusus	60.000	90.000	-	150.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	75.000	250.000	85.000	410000
2	Sedang khusus	100.000	350.000	110.000	560.000
3	Besar	150.000	560.000	190.000	900.000

i.2. Bedah Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	30.000	75.000	-	105.000
2	Kecil khusus	60.000	115.000	-	175.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	150.000	340.000	115.000	605.000
2	Sedang khusus	200.000	470.000	160.000	830.000
3	Besar	250.000	800.000	290.000	1.340.000

i.3. Bedah Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesi	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	40.000	95.000	-	135.000
2	Kecil khusus	75.000	140.000	-	215.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	275.000	700.000	245.000	1.220.000
2	Sedang khusus	350.000	1.000.000	350.000	1.700.000
3	Besar	450.000	1.680.000	570.000	2.700.000

j.1. Anesthesi Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Medik Non Operatif			
1	Kecil	16.000	16.000	32.000
2	Sedang	40.000	56.000	96.000
3	Sedang khusus	26.000	70.000	96.000
4	Besar	16.000	120.000	136.000
5	Besar khusus	80.000	120.000	200.000

j.2. Anesthesi Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Medik Non Operatif			
1	Kecil	20.000	25.000	45.000
2	Sedang	60.000	75.000	135.000
3	Sedang khusus	30.000	110.000	140.000
4	Besar	20.000	190.000	210.000
5	Besar khusus	100.000	190.000	290.000

j.3. Anesthesi Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	Medik Non Operatif			
1	Kecil	40.000	50.000	90.000
2	Sedang	110.000	160.000	270.000
3	Sedang khusus	50.000	230.000	280.000
4	Besar	70.000	350.000	420.000
5	Besar khusus	200.000	380.000	580.000

k.1. Jantung dan Pembuluh Darah Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	10.000	15.000	25.000
2	EKG Monitor	20.000	20.000	40.000
3	Echocardiography			
	a. Biasa	50.000	110.000	160.000
	b. Warna	60.000	150.000	210.000
4	Treadmill test	40.000	90.000	130.000
5	Punksi Pericard	50.000	110.000	160.000
6	Pemasangan CVP	26.000	70.000	96.000
7	Echo Stress Test	80.000	176.000	256.000

k.2. Jantung dan Pembuluh Darah Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	10.000	20.000	30.000
2	EKG Monitor	20.000	25.000	45.000
3	Echocardiography			
	a. Biasa	60.000	175.000	235.000
	b. Warna	80.000	230.000	310.000
4	Treadmill test	50.000	140.000	190.000
5	Punksi Pericard	60.000	175.000	235.000
6	Pemasangan CVP	30.000	115.000	145.000
7	Echo Stress Test	100.000	220.000	320.000

k.3. Jantung dan Pembuluh Darah Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	EKG	15.000	25.000	40.000
2	EKG Monitor	25.000	35.000	60.000
3	Echocardiography			
	a. Biasa	75.000	220.000	350.000
	b. Warna	100.000	290.000	465.000
4	Treadmill test	65.000	175.000	285.000
5	Punksi Pericard	75.000	220.000	350.000
6	Pemasangan CVP	40.000	145.000	220.000
7	Echo Stress Test	125.000	345.000	480.000

I.1. Tarif Tindakan Non Spesialis

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Insisi abses	10.000	20.000	30.000
2	Skaling tiap rahang	25.000	45.000	70.000
3	Tambalan sementara	7.000	18.000	25.000
4	Tambalan amalgram I	15.000	25.000	40.000
	Tambalan amalgram II	20.000	40.000	60.000
5	Tambalan light curing I / GIC	20.000	25.000	45.000
	Tambalan light curing II	25.000	50.000	75.000
6	Ekstraksi gigi tetap	10.000	25.000	35.000
	Ekstraksi gigi tetap komplikasi	20.000	40.000	60.000
7	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	6.000	14.000	20.000
8	Ekstraksi gigi susu injeksi	10.000	20.000	30.000
9	Perawatan endodontik			
	a. Akar tunggal	10.000	20.000	30.000
	b.Akar ganda	15.000	30.000	45.000
10	Pengisian saluran akar			
	a. Akar tunggal	10.000	30.000	40.000
	b. Akar ganda	15.000	35.000	50.000

I.2. Tarif Gigi Tiruan/ Orthodonty

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	a. Gigi tiruan lepas ÷ 1 gigi	10.000	30.000	40.000
	b. Gigi berikutnya	5.000	10.000	15.000
2	GT logam (frame)			
	a. Frame rahang	35.000	40.000	75.000
	b. Satu gigi	10.000	25.000	35.000
3	a. GT cekat akrilik	50.000	75.000	125.000
	b. GT pakai Backing	60.000	75.000	135.000
	c. GT cekat porselen	60.000	100.000	160.000
4	a. PIN	15.000	20.000	35.000
	b. Crown akrilik	15.000	20.000	35.000
	c. Crown porselen	15.000	25.000	40.000
5	Gigi tiruan penuh			
	a. 2rahang	150.000	400.000	550.000
	b. 1rahang	75.000	225.000	300.000
6	a. Mahkota penuh akrilik	15.000	75.000	90.000
	b. Mahkota penuh porselen	15.000	100.000	115.000
	c.Mahkota penuh metal	15.000	75.000	90.000
7	Onlay/ inlay	15.000	75.000	90.000
8	Reparasi			
	a. Rebasing	10.000	50.000	60.000
	b. Relining	10.000	50.000	60.000
	c. Retak/ patah	10.000	35.000	45.000
9	a. Orthodonty lepasan/ rahang	125.000	275.000	400.000
	b. Orthodonty cekat/ rahang	7.50.000	1.250.000	2.000.000
10	Metal crown	20.000	65.000	85.000

I.3. Tarif Tindakan Spesialis Gigi & Mulut Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesy	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	16.000	40.000	-	56000
2	Sedang	24.000	76.000	-	100.000
3	Sedang khusus	56.000	114.000	-	200.000
4	Besar	80.000	180.000	-	260.000
5	Di OK	160.000	400.000	-	560.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	75.000	440.000	145.000	660.000
2	Besar	150.000	510.000	180.000	840.000
3	Besar khusus	200.000	675.000	225.000	1.100.000

I.4. Tarif Tindakan Spesialis Gigi & Mulut Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesy	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	20.000	65.000	-	85.000
2	Sedang	30.000	125.000	-	155.000
3	Sedang khusus	70.000	225.000	-	295.000
4	Besar	100.000	280.000	-	380.000
5	Di OK	200.000	625.000	-	825.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	150.000	625.000	215.000	990.000
2	Besar	250.000	750.000	260.000	1.260.000
3	Besar khusus	375.000	940.000	330.000	1.645.000

I.5. Tarif Tindakan Spesialis Gigi & Mulut Kelas I

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			Jasa Operator	Jasa Anaesthesy	
A	Operatif Non Narkosis				
1	Kecil	40.000	130.000	-	170.000
2	Sedang	60.000	250.000	-	310.000
3	Sedang khusus	130.000	460.000	-	590.000
4	Besar	190.000	570.000	-	760.000
5	Di OK	250.000	780.000	-	1.650.000
B	Operatif Narkosis				
1	Sedang	350.000	1.000.000	215.000	2.000.000
2	Besar	450.000	1.500.000	550.000	2.500.000
3	Besar khusus	650.000	2.000.000	650.000	3.300.000

I.6. Tarif Laboratorium Perawatan Gigi Tiruan

No	Uraian	Tarif
1	GT akrilik	
	a. Gigi tiruan lepas pertama	150.000
	b. Gigi berikutnya	50.000
2	GT logam (frame)	
	a. Frame per rahang	350.000
	b. Satu (1) gigi	100.000
	c. Sadle tanpa gigi	250.000
3	a. GT cekat akrilik/ gigi	100.000
	b. GT cekat akrilik pakai Backing	175.000
	c. GT cekat porselen	300.000
4	PIN (tanpa mahkota)	
	a. Mahkota akrilik	100.000
	b. Mahkota porselen	200.000
5	Gigi tiruan penuh	
	a. Dua (2) rahang	900.000
	b. Satu (1) rahang	500.000
6	Mahkota	
	a. Mahkota penuh akrilik	150.000
	b. Mahkota penuh porselen	300.000
	c. Mahkota penuh metal	200.000
7	Onlay/ inlay	140.000
8	Reparasi	
	a. Rebasing	150.000
	b. Relining	150.000
	c. Retak/ patah	100.000
9	Orthodonty lepasan/ rahang	200.000

f. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

1. Radiologi Kelas III

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	KONVENSIONAL			
1	Thorax AP/PA/lat	23.400	12.600	36.000
2	Thorax AP/PA + lateral	29.600	16.400	46.000
3	Abdomen	23.400	12.600	36.000
4	Abdomen 3 posisi	42.600	23.400	66.000
5	Pelvis	23.400	12.600	36.000
6	Manus/ telapak tangan AP/ lateral	28.600	15.400	44.000
7	Pedis/ telapak kaki Ap/ lateral	28.600	15.400	44.000
8	Enu Ap+lateral+skyline	30.600	16.400	47.000
9	Genu Ap+lateral	28.600	15.400	44.000
10	Femur	28.600	15.400	44.000
11	Cluris	28.600	15.400	44.000
12	Ankle	28 600	15.400	44.000
13	Cubiti	28.600	15.400	44.000
14	Antebrachi	28.600	15.400	44.000
15	Schedel	28.600	15.400	40.000
16	Schedel+basis	30.600	16.400	47.000
17	Sinus para nasal	30.600	16.400	47.000
18	Sinus adenoid	28.600	15.400	44.000
19	Mastoid	28.600	15.400	44.000
20	Cervical Ap+lateral	28.600	15.400	44.000
21	Cervical Ap+lateral+oblinque Ka-Ki	28.600	21.000	60.000
22	TMJ	30.600	16.400	47.000
23	Orbita	28.600	15.400	60.000
24	Rahang	28.600	15.400	44.000
25	V. Thoracal	31.200	16.800	48.000
26	V. Lumbosacral AP/Lat	31.200	16.800	48.000
27	Os. Coccygeus	31.200	16.800	48.000
28	Os. Sacrum	31.200	16.800	48.000
29	Clavicula	23.400	12.600	36.000
30	Scapula	28.600	15.400	44.000
31	Humerus	28.600	15.400	44.000
32	Pergelangan tangan/ Wirst joint	28.600	15.400	44.000
33	Soft tissue leher	28.600	15.400	44.000
34	Colli leher	28.600	15.400	44.000
35	Pelvimetri	28.600	19.600	45.000
36	Os. Nasal	36.400	15.400	44.000
37	Vertebrae 4 posisi	42.600	23.400	66.000
38	Bone Survei	117.000	63.000	180.000
39	Bone Age	32.800	17.200	50.000
40	Gigi	14.400	7.600	22.000

B	KHUSUS			
41	Apendicogram	51.200	33.800	85.000
42	Cor analisa	42.200	27.800	70.000
43	BNOVIP	84.000	56.000	140.000
44	HSG	120.000	80.000	200.000
45	Cystogram	89.800	60.200	150.000
C	USG			
46	USG mammae	60.000	40.000	100.000
47	USG thyrcid	60.000	40.000	100.000
48	USG parotis	60.000	40.000	100.000
49	USG abdomen bawah	36.000	24.000	60.000
50	USG abdomen atas	43.200	28.000	72.000
51	USG whole abdomen	72.000	48.000	120.000
52	USG testis	60.000	40.000	100.000
53	USG lengan	60.000	40.000	100.000
54	USG bahu	60.000	40.000	100.000
55	USG soft tissue	30.000	40.000	100.000
56	USG ginjal	60.000	40.000	100.000
57	USG guide/ operasi	60.000	40.000	100.000
58	USG bayi	60.000	40.000	100.000
59	USG dopler	60.000	40.000	100.000
60	USG kebidanan	60.000	40.000	100.000
51	USG ginekologi	60.000	40.000	100.000

2. Radiologi Kelas II

No	Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	KONVENSIONAL			
1	Thorax AP/PA/lat	36.400	19.600	56.000
2	Thorax AP/PA + lateral	46.200	24.800	71.000
3	Abdomen	36.400	19.600	56.000
4	Abdomen 3 posisi	66.300	35.700	102.000
5	Pelvis	36.400	19.600	56.000
6	Manus/ telapak tangan AP/ lateral	44.850	24.150	69.000
7	Pedis/ telapak kaki Ap/ lateral	44.850	24.150	69.000
8	Enu Ap+lateral+skyline	44.100	25.900	74.000
9	Genu Ap+lateral	44.850	24.150	69.000
10	Femur	44.850	24.150	69.000
11	Cluris	44.850	24.150	69.000
12	Ankle	44.850	24.150	69.000
13	Cubiti	44.850	24.150	69.000
14	Antebrachi	44.850	24.150	69.000
15	Schedel	44.850	24.150	69.000
16	Schedel+basis	48.100	25.900	74.000
17	Sinus para nasal	48.100	25.900	74.000

18	Sinus adenoid	44.850	24.150	69.000
19	Mastoid	44.850	24.150	69.000
20	Cervical Ap+lateral	44.850	24.150	69.000
21	Cervic al Ap+lateral+oblinque Ka-Ki	61.600	32.900	94.000
22	TMJ	48.100	25.900	74.000
23	Orbita	44.850	24.150	69.000
24	Rahang	44.850	24.150	69.000
25	V. Thoracal	48.750	26.250	75.000
26	V. Lumbosacral AP/Lat	48.750	26.250	75.000
27	Os. Coccygeus	48.750	26.250	75.000
28	Os. Sacrum	48.750	26.250	75.000
29	Clavicula	36.400	19.600	56000
30	Scapula	44.850	24.150	69.000
31	Humerus	44.850	24.150	69.000
32	Pergelangan tangan/ Wirst joint	44.850	24.150	69.000
33	Soft tissue leher	44.850	24.150	69.000
34	Colli leher	44.850	24.150	69.000
35	Pelvimetri	45.500	24.150	70.000
36	Os. Nasal	44.850	24.150	69.000
37	Vertebrae 4 posisi	66.300	35.700	102.000
38	Bone Survei	182.650	98.350	281.000
39	Bone Age	50.700	27.300	78.000
40	Gigi	22.000	12.000	34.000
B	KHUSUS			
41	Apendicogram	79.200	52.800	132.000
42	Cor analisa	64.800	43.200	108.000
43	BNOVIP	130.800	87.200	218.000
44	HSG	187.200	124.800	312.000
45	Cystogram	139.800	93.200	233.000
C	USG			
46	USG mammae	93.000	62.400	156.000
47	USG thyroid	93.000	62.400	156.000
48	USG parotis	93.000	62.400	156.000
49	USG abdomen bawah	55.800	37.200	93.000
50	USG abdomen atas	67.200	44.800	112.000
51	USG whole abdomen	112.200	74.800	187.000
52	USG testis	93.000	62.400	156.000
53	USG lengan	93.000	62.400	156.000
54	USGbahu	93.000	62.400	156.000
55	USG soft tissue	93.000	62.400	156.000
56	USG ginjal	93.000	62.400	156.000
57	USG guide/ operasi	93.000	62.400	156.000
58	USG bayi	93.000	62.400	156.000
59	USG dopler	93.000	62.400	156.000
60	USG kebidanan	93.000	62.400	156.000
61	USG ginekologi	93.000	62.400	156.000

3. Radiologi Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	KONVENSIONAL			
1	Thorax AP/PA/lat	45.000	24.500	70.000
2	Thorax AP/PA+lateral	57.200	30.800	88.000
3	Abdomen	45.000	24.500	70.000
4	Abdomen 3 posisi	82.500	44.500	127.000
5	Pelvis	45.000	24.500	70.000
6	Manus/telapak tangan Ap/lateral	56.000	30.000	86.000
7	Pedis/telapak tangan Ap/lateral	56.000	30.000	86.000
8	Gebu Ap+Lateral+Skyline	59.800	32.200	92.000
9	Gebu Ap+Lateral	56.000	30.000	86.000
10	Femur	56.000	30.000	86.000
11	Cluris	56.000	30.000	86.000
12	Ankle	56.000	30.000	86.000
13	Cubiti	56.000	30.000	86.000
14	Antebrachi	56.000	30.000	86.000
15	Schedel	56.000	30.000	86.000
16	Schedel + basis	59.800	32.200	92.000
17	Sinus para nasal	59.800	32.200	92.000
18	Sinus adehoid	56.000	30.000	86.000
19	Mastoid	56.000	30.000	86.000
20	Cervical AP + lateral	56.000	30.000	86.000
21	Cervical AP + laterai + Oblique Ka Ki	76.000	41.000	117.000
22	TMJ	59.800	32.200	92.000
23	Orbita	56.000	30.000	86.000
24	Rahang	56.000	30.000	86.000
25	V. Thoracal	61.000	33.000	94.000
26	V. lumbosacral AP/lat	61.000	33.000	94.000
27	Os. Coccygeus	61.000	33.000	94.000
28	Os. Sacrum	61.000	33.000	94.000
29	Clavivula	56.000	30.000	86.000
30	Scapula	56.000	30.000	86.000
31	Humerus	56.000	30.000	86.000
32	Pergelangan tangan/wirst joint	56.000	30.000	86.000
33	Soft tissue laher	56.000	30.000	86.000
34	Coll leher	56.000	30.000	86.000
35	Pelvimetri	56.500	30.500	87.000
36	Os. Nasal	56.000	30.000	86.000
37	Verterae 4 posisi	82.500	44.500	127.000
38	Bone Survel	228.000	123.000	351.000
39	Bone Age	63.000	34.000	97.000
40	Gigi	28.000	15.000	43.000

B	KHUSUS			
41	Apendicogram	99.000	66.000	165.000
42	Cor Analisa	81.000	54.000	135.000
43	BNO/IVP	163.200	108.800	272.000
44	HSG	234000	156.000	390.000
45	Cystogram	174.600	116.400	291.000
C	USG			
46	USG mammae	117.000	78.000	195.000
47	USG Thyroid	117.000	78.000	195.000
48	USG Parotis	117.000	78.000	195.000
49	USG Abdomen Bawah	69.600	46.400	116.000
50	USG Abdomen Atas	84.000	56.000	140.000
51	USG Whole Abdomen	140.400	93.600	234.000
52	USG Testis	117.000	78.000	195.000
53	USG Lengan	117.000	78.000	195.000
54	USG Bahu	117.000	78.000	195.000
55	USG Soft Tissue	117.000	78.000	195.000
56	USG Ginjal	117.000	78.000	195.000
57	USG Guide/Operasi	117.000	78.000	195.000
58	USGBayi	117.000	78.000	195.000
59	USG Dopler	117.000	78.000	195.000
60	USG Kebidanan	117.000	78.000	195.000
61	USG Ginekologi	117.000	78.000	195.000

1 Laboratorium Klinik Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, L, Ht, Tr, E)	12.000	4.000	16.000
2	Darah Lengkap (Rutin + Diff + LED)	14.500	5.000	19.500
3	Seri DHF (Hb, Ht, L, Tr)	10.000	3.000	13.000
4	Hitung Jenis Lekosit	4.000	1.500	5.500
5	LED	2.250	750	3.000
6	NER (MCH, MCHC, MCV)	9.000	3.000	12.000
7	Golongan Darah	4850	1.650	6.500
8	Retikulosit	4.850	1.650	6.500
9	Hitung Eosinofil	4.850	1.650	6.500
10	Gamb. Darah Tepi	19.500	6.500	26.000
11	Malaria	7.500	2.500	10.000
12	Mikrofilaria	7.500	2.500	10.00
	Hemoglobin	4.850	1.600	6.500
	SelLE	7.500	2.500	10.000

B	URINALISA			
	Urine Rutin (Makros + 10 pmtr)	6.750	2.250	9.000
	Urine Lengkap (rutin + sedimen)	12.500	4.000	16.500
	Reduksi urine	2.250	750	3.000
	Protein Kuantitatif	7.500	2.500	10.000
	Protein Bence jones	7.500	2.500	10.000
	Tes kehamilan	7.500	2.500	10.000
C	HEMOSTASIS			
	Masa Perdarahan	3.750	1.250	5.000
	Masa Pembekuan	3.750	1250	5.000
	Masa Pprotombin (PT)	17.000	6.000	23.000
	INR	17.000	6.000	23.000
	APTT	17.000	6.000	23.000
	Fibrinogen	17.000	6.000	23.000
	D-dimer	160.000	5.000	165.000
D	TINJA			
	Rutin (Makro +mikros)	5.250	1.750	7.000
	Lengkap (rutin + pH + reduksi)	7.500	2.500	10.000
	Darah Samar	7.500	2.500	10.000
E	KIMIA			
1	SGOT	7.500	2.500	10.000
2	SGPT	7.500	2.500	10.000
3	Bilirubin Total	5.250	1.750	7.000
4	Bili rubin Direct	5250	1.750	7.000
5	Bilirubin Indirect	5.250	1.750	7.000
6	Gamma GT	11.250	3.750	15.000
7	ALP	7.500	2.500	10.000
8	Protein Total	5.250	1.750	7.000
9	Albumin	5.250	1.750	7.000
10	Globulin	5.250	1.750	7.000
11	Ureum	6.750	2.250	9.000
12	Creatinin	6.750	2.250	9.000
13	Creatinin clearence	15.000	5.000	20.000
14	Ureum clearance	15.000	5.000	20.000
15	Asam Urat	7.500	2.500	10.000
16	Cholesterol Total	9.000	3.000	12.000
17	Trigliserid	9.750	3.250	13.000

18	HDL	9.000	3.000	12.000
19	LDL	9.000	3.000	12.000
20	Glukosa Sewaktu	9.750	3.250	13.000
21	Glukosa puasa	9.750	3.250	13.000
22	Glukosa 2 jam PP	9.750	3.250	13.000
23	Kurva harian (5 x GDS)	29.250	9.750	39.000
24	TTGO (5 x glukosa)	45.750	15.250	61.000
25	CK-total	24.000	8.000	32.000
26	CK-MB	24.000	8.000	32.000
27	Na, K, Cl	30.000	10.000	40.000
28	Kalsium (Ca)	12.000	4.000	16.000
29	Fosfor (P)	12.000	4.000	16.000
30	Magnesium	12.000	4.000	16.000
31	Analisa Gas Darah	52.000	15.000	67.000
F	IMUNO SEROLOGI			
1	HbsAg	18.000	6.000	24.000
2	Anti BHs	18.000	6.000	24.000
3	Anti HCV	24.000	8.000	32.000
4	Widal	13.000	4.500	17.500
5	PAP TB	29.250	9.750	39.000
6	VDRL	7.500	2.500	10.000
7	RF (Rheumatoid Factor)	12.000	4.000	16.000
	CRP Kualitatif	12.000	4.000	16.000
	Anti Dengue IgM, IgG	53.250	17.750	71.000
	TPHA	30.000	10.000	40.000
	Anti HIV	45.000	15.000	60.000
	ASTO	14.000	4.000	18.000
	CRP Kualitatif	17.000	5.000	22.000
G	MIKROBIOLOGI			
	Pewarnaan gram	4.850	1.650	6.500
	Pewarnaan BTA	4.850	1.650	6.500
H	CAIRAN TUBUH			
	Analisa cairan otak	51.000	17.000	68.000
	Analisa sperma	19.000	6.000	25.000
	Analisa cairan sendi	41.000	14.000	55.000
	Analisa cairan tubuh lain (pleura dll)	51.000	17.000	68.000
I	NARKOBA			
	Marihuana	15.000	5.000	20.000
	MoRphine	15.000	5.000	20.000
	Amphetamin	15.000	5.000	20.000
	Coccain	15.000	5.000	20.000
	Metamphetamin	15.000	5.000	20.000
	Benzodiazepin	15.000	5.000	20.000

b.2 Laboratorium Klinik Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, L, Ht, Tr, E)	15.000	5.000	20.000
2	Darah Lengkap (Rutin + Diff + LED)	18.000	6.000	24.000
3	Seri DHF (Hb, Ht, L, Tr)	12.000	4.000	16.000
4	Hitung Jenis Leikosit	5.000	2.000	7.000
5	LED	3.000	1.000	4.000
6	NER (MCH, MCHC, MCV)	11.000	4.000	15.000
7	Golongan Darah	6.000	2.000	8.000
8	Retikulosit	6.000	2.000	8.000
9	Hitung Eosinofil	6.000	2.000	8.000
10	Gamb. Darah Tepi	24.000	8.000	32.000
11	Malaria	9.000	3.000	12.000
12	Mikrofilaria	9.000	3.000	12.000
13	Hemoglobin	6.000	2.000	8.000
14	Sel LE	10.000	3.000	13.000
B	URINALISA			
	Urine Rutin (Makros + 10 pmtr)	8.500	2.500	11.000
	Urine Lengkap (rutin + sedimen)	16.000	5.000	21.000
	Reduksi urine	3.000	1.000	4.000
	Protein Kuantitatif	9.000	3.000	12.000
	Protein Bence jones	9.000	3.000	12.000
	Tes kehamilan	9.000	3.000	12.000
C	HEMOSTASIS			
1	Masa Perdarahan	4.500	1.500	6.000
2	Masa Pembekuan	4.500	1.500	6.000
3	Masa Protombin (PT)	21.000	7.000	28.000
4	INR	21.000	7.000	28.000
5	APTT	21.000	7.000	28.000
6	Fibrinogen	21.000	7.000	28.000
7	D-dimer	175.000	10.000	185.000
D	TINJA			
1	Rutin (Makro +mikros)	6.500	2.500	9.000
2	Lengkap (rutin + pH + reduksi)	9.000	3.000	12.000
3	Darah Samar	9.000	3.000	12.000

E	KIMIA			
1	SGOT	9.000	3.000	12.000
2	SGPT	9.000	3.000	12.000
3	Bilirubin Total	6.500	2.500	9.000
4	Bilirubin Direct	6.500	2.500	9.000
5	Bilirubin Indirect	6.500	2.500	9.000
6	Gamma GT	14.000	5.000	19.000
7	ALP	9.000	3.000	12.000
8	Protein Total	6.500	2.500	9.000
9	Albumin	6.500	2.500	9.000
10	Globulin	6.500	2.500	9.000
11	Ureum	8.500	2.500	11.000
12	Creatinin	8.500	2.500	11.000
13	Creatinin clearence	19.000	6.000	25.000
14	Ureum clearance	19.000	6000	25.000
15	Asam Urat	9.000	3.000	12.000
16	Cholesterol Total	11.000	4.000	15.000
17	Trigliserid	12.000	4.000	16.000
18	HDL	11.000	4.000	15.000
19	LDL	11.000	4.000	15.000
20	Glukosa Sewaktu	12.000	4.000	16.000
21	Glukosa puasa	12.000	4.000	16.000
22	Glukosa 2 jam PP	12.000	4.000	16.000
23	Kurva harian (3 x GDS)	37.000	12.000	49.000
24	TTGO (5x glukosa)	57.000	19.000	76.000
25	CK-total	30 000	10.000	40.000
26	CK-MB	30.000	10.000	40.000
27	Na, K, Cl	38.000	12.000	50.000
28	Kalsium (Ca)	15.000	5.000	20.000
29	Fosfor (P)	15.000	5.000	20.000
30	Magnesium	15.000	5.000	20.000
31	Analisa Gas Darah	63.000	21.000	84.000
F	IMUNO SEROLOGI			
1	HbsAg	22.500	7.500	30.000
2	Anti BHs	22.500	7.500	30.000
3	Anti HCV	30.000	10.000	40.000
4	Widal	16.500	5.500	22.000
5	PAP TB	37.000	12.000	49.000
6	VDRL	9.000	3.000	12.000

7	RF(Rheumatoid Factor)	15.000	5.000	20.000
8	CRP Kualitatif	15.000	5.000	20.000
9	Anti Dengue IgM, IgG	67.000	22.000	89.000
10	TPHA	38.000	12.000	50.000
11	Anti HIV	57.000	18.000	75.000
12	ASTO	17.000	6.000	23.000
13	CRP Kualitatif/ kuantitatif	21.000	7.000	28.000
G	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan gram	6.000	2.000	8.000
2	Pewarnaan BTA	6.000	2.000	8.000
H	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan otak	65.000	20.000	85.000
2	Analisa sperma	24.000	8.000	32.000
3	Analisa cairan sendi	51.000	17.000	68.000
4	Analisa cairan tubuh lain (pleura dll)	65.000	20.000	85.000
I	NARKOBA			
	Marihuana	19.000	6.000	25.000
	MoRphine	19.000	6.000	25.000
	Amphetamin	19.000	6.000	25.000
	Cocc_ain	19.000	6.000	25.000
	Metamphetamin	19.000	6.000	25.000
	Benzodiazepin	19.000	6.000	25.000

b.3Laboratorium Klinik Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, L, Ht, Tc, E)	21.000	4.000	25.000
2	Darah Lengkap (Rutin + Diff + LED)	26.000	4.000	30.000
3	Seri DHF (Hb, Ht, L, Tr)	17.000	3.000	20.000
4	Hitung Jenis Lekosit	6.000	2.000	8.000
5	LED	3.000	1.000	4.000
6	NER (MCH, MCHC, MCV)	14.000	5.000	19.000
7	Golongan Darah	8.000	2.000	10.000
8	Retikulosit	8.000	2.000	10.000
9	Hitung Eosinofil	8.000	2.000	10.000
10	Gamb. Darah Tepi	25.000	15.000	40.000
11	Malaria	13.000	2.000	15.000
12	Mikrofilaria	13.000	2.000	15.000
13	Hemoglobin	8.500	1.500	10.000
14	Sel LE	12.000	4.000	16.000

B	URINALISA			
1	Urine Rutin (Makros + 10 pmtr)	11.000	3.000	14.000
2	Urine Lengkap (rutin + sedimen)	12.500	3.500	16.000
3	Reduksi urine	5.000	1.000	6.000
4	Protein Kuantitatif	12.000	3.000	15.000
5	Protein Bence jones	12.000	3.000	15.000
6	Tes kehamilan	13.000	3.000	16.000
C	HEMOSTASIS			
1	Masa Perdarahan	5.000	2.000	7.000
2	Masa Pembekuan	5.000	2.000	7.000
3	Masa Pprotombin (PT)	26.250	8.750	35.000
4	INR	26.250	8.750	35.000
5	APTT	26.250	8.750	35.000
6	Fibrinogen	26.250	8.750	35.000
7	D-dimer	190.000	15.000	205.000
D	TINJA			
1	Rutin (Makro +mikros)	9.000	2.000	11.000
2	Lengkap (rutin + pH + reduksi)	12.500	2.500	15.000
3	Darah Samar	13.000	2.000	15.000
E	KIMIA			
1	SGOT	12.000	4.000	13.000
2	SGPT	12.000	4.000	16.000
3	Bilirubin Total	8.250	2.750	11.000
4	Bilirubin Direct	8.250	2.750	11.000
5	Bilirubin Indirect	8.250	2.750	11.000
6	Gamma GT	20.000	3.000	23.000
7	ALP	11.250	3.750	15.000
8	Protein Total	8.250	2.750	11.000
9	Albumin	8.250	2.750	11.000
10	Globulin	8.250	2.750	11.000
11	Ureum	10.500	3.500	14.000
12	Creatinin	10.500	3.500	14.000
13	Creatinin clearence	24.000	8.000	32.000
14	Ureum clearance	24.000	8.000	32.000
15	Asam Urat	11.500	3.500	15.000
16	Cholesterol Total	13.000	4.500	18.000
17	Trigliserid	15.500	4.500	20.000
18	HDL	13.500	4.500	18.000

19	LDL	13.500	4.500	18.000
20	Glukosa Sewaktu	16.000	4.000	20.000
21	Glukosa puasa	15.000	5.000	20.000
22	Glukosa 2 jam PP	15.000	5.000	20.000
23	Kurva harian (3 x GDS)	48.000	12.000	60.000
24	TTGO (5 x glukosa)	80.000	15.000	95.000
25	CK-total	38.000	12.000	50.000
26	CK-MB	38.000	12.000	50.000
27	Na, K, Cl	47.000	15.000	62.000
28	Kalsium (Ca)	19.000	6.000	25.000
29	Fosfor (P)	19.000	6.000	25.000
30	Magnesium	19.000	6.000	25.000
31	Analisa Gas Darah	79.000	26.000	105.000
F	IMUNO SEROLOGI			
1	HbsAg	27.750	9.250	37.000
2	Anti BHs	27.750	9.250	37.000
3	Anti HCV	48.000	12.000	50.000
4	Widal	20.250	6.750	27.000
5	PAP TB	55.000	5.000	60.000
6	VDRL	12.000	3.000	15.000
7	RF(Rheumatoid Factor)	22.000	3.000	25.000
8	CRP Kualitatif	21.000	4.000	25.000
9	Anti Dengue IgM, IgG	100.000	10.000	110.000
10	TPHA	47.000	15.000	62.000
11	Anti HIV	71.000	23.000	94.000
12	ASTO	21.000	7.000	28.000
13	CRP Kualitatif/ kuantitatif	26.000	9.000	35.000
G	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan gram	8.000	2.000	10.000
2	Pewarnaan BTA	8.000	2.000	10.000
H	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan otak	79.000	26.000	105.000
2	Analisa sperma	30.000	10.000	40.000
3	Analisa cairan sendi	64.000	21.000	85.000
4	Analisa cairan tubuh lain (pleura dll)	79.000	26.000	105.000
I	NARKOBA			
	Marihuana	24.000	8.000	32.000
	MoRphine	24.000	8.000	32.000
	Amphetamin	24.000	8.000	32.000
	Coccain	24.000	8.000	32.000
	Metamphetamin	24.000	8.000	32.000
	Benzodiazepin	24.000	8.000	32.000

g. Tarif Pelayanan Farmasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Obat dan/ atau bahan dan alat habis pakai	100% HNA	25% HNA	125% HNA
2	Penyiapan obat per R/ (non racikan)	-	500	500
3	Peracikan capsul/ puyer per 10 cap/ 10 bungkus	500	500	1000

h. Tarif Pengujian Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Oleh dokter umum	5.000	5.000	10.000
2	Oleh dokter spesialis	10.000	10.000	20.000

i. Tarif Pengujian Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemulasan jenazah	7.500	7.500	15.000
2	Pemulasan jenazah normal	100.000	85.000	185.000
3	Perawatan jenazah . 2 hari/ busuk	150.000	200.000	350.000
4	Formalin jenazah	150.000	150.000	300.000
5	Sewa KM dengan pendingin	120.000	20.000	140.000
6	Upacara jenazah (1x24 jam)	150.000	50.000	200.000

j. Tarif Pengujian Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Visum hidup	10.000	10.000	20.000
2	Visum luar jenazah	15.000	25.000	40.000

Pasal63

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan persampahan/ kebersihan adalah sebagai berikut:

a. besarnya tarif retribusi pelayanan sampah/kebersihan dari perorangan rumah tangga disesuaikan dengan jumlah keluarga (KK) perorangan dengan mengacu pada golongan bangunan, kelas-kelas jalan, jalur jalan dan perk antoran di sepanjang jalan wilayah Kabupaten Bekasi:

1. sampah rumah tangga di jalan:
   a) Kelas I(jalan protokol):
      1) Rumah besar dengan tipe 70 ke atas Rp 10.000,-/bulan
      2) Rumah sedang dengan tipe 45-70 Rp 7.000,-/bulan
      3) Rumah kecil/sederhana Rp 6.000,-/bulan
   b) Kelas II dan III (jalan Kabupaten):
      1) Rumah besar dengan tipe 70 ke atas Rp 8.000,-/bulan
      2) Rumah sedang dengan tipe 45-70 Rp 5.000,-/bulan
      3) Rumah kecil/sederhana Rp 4.000,-/bulan

2. Komplek Perumahan:

a) Komplek perumahan mewah/realestate	Rp	12.000,-/bulan
b) Komplek perumahan KPR/BTN dan sejenisnya (kategori besar)	Rp	5.000,-/bulan
c) Kompiek KPR/BTN dan perumahan Instansi (kategori sedang)	Rp	3.000,-/bulan
d) Rumah susun, rumah sederhana	Rp	2.500,-/bulan

3. Asrama:

a) Asrama TNI dan Polri	Rp	2.500,-/KK/bulan
b) Asrama mahasiswa/pelajar	Rp	2.500,-/KK/bulan

4. Perkantoran:

a) Kantor Pemerintah	Rp	100.000,-/ritase
b) Kantor Swasta	Rp	100.000,-/ritase
c) Bank		
1) Bank Pemerintah	Rp	100.000,-/ritase
2) Bank Swasta	Rp	100.000,-/ritase
d) Rumah Kantor (Rukan)	Rp	20.000,-/bulan
e) Sampah yang dihasilkan dari tempat pelayanan Rumah Sakit / Poliklinik/ Puskesmas dan sejenisnya:		
1) Rumah Sakit	Rp	100.000,-/ritase
2) Rumah Bersalin Besar	Rp	100.000,-/ritase
3) Rumah Bersalin Kecil	Rp	50.000,-/ritase
4) Poliklinik Swasta	Rp	50.000,-/ritase
5) Puskesmas	Rp	25.000,-/ritase

b. Sampah yang dihasilkan olah hotel/wisma/penginapan, restoran, toko, bioskop, gedung, pusat perbelanjaan dan lain-lain:

1. bangunan untuk usaha/niaga :

a) Hotel/wisma/penginapan	Rp	100.000,-/ritase
b) Restoran/rumah makan	Rp	100.000,-/ritase

c) toko/pemangkas rambut/tukang jahit/warung:

1)	rumah toko (ruko)	Rp	25.000,-/bulan
2)	toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), apotek, salon, dan usaha lainnya	Rp	11.000,-/bulan
3)	toko yang merangkap tempat tinggal	Rp	22.000,-/bulan
4)	pangkas rambut yang memperkerjakan lebih dari 5 orang tukang cukur	Rp	15.000,-/bulan
5)	pangkas rambut yang memperkerjakan kurang dari 5 orang tukang cukur	Rp	10.000,-/bulan
6)	tukang jahit yang memperkerjakan lebih dari 5 orang tukang jahit	Rp	10.000,-/bulan
7)	tukang jahit yang memperkerjakan kurang dari 5 orang tukang jahit	Rp	7.500,-/bulan
8)	warung / kios	Rp	6.000,-/bulan

d) bioskop:

1)	kelas i dengan jumlah studio lebih 4 buah	Rp	30.000,-/bulan
2)	kelas ii dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	Rp	25.000,-/bulan
3)	kelas iii dengan jumlah studio 1 buah	Rp	20.000,-/bulan

e) mini market/grosir/agen

1)	mini market	Rp	100.000,-/ritase
2)	grosir/agen	Rp	100.000,-/ritase

2. bangunan pendidikan:

a)	kampus pendidikan	Rp	100.000,-/ritase
b)	Bangunan pendidikan (TK s/d SMA)	Rp	100.000,-/ritase

3. Gedung pusat perbelanjaan Rp 100.000,-/ritase

4. Lain-lain:

a) Lapakusaha limbah non - B3	Rp	100.000,-/ritase
b) Sampah tebangan pohon dan bongkaran rumah	Rp	100.000,-/ritase

c. besarnya tarif retribusi sampah pasar digolongkan sebagai berikut:

1. pasar induk:		
a) sampah basah	Rp	2.000,-/kios/hari
b) sampah kering	Rp	1.000,-/kios/hari
2. pasar tradisional:		
a) sampah basah	Rp	1.500,-/kios/hari
b) sampah kering	Rp	1.000,-/kios/hari

d. Pengangkutan sampah atau limbah non-B3 yang berasal dari pabrik/ industri pada kawasan dan zona industri di wilayah Kabupaten Bekasi ke TPSA dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,-/ritase

1. Pembuangan di TPSA dikenakan pada setiap orang/badan swasta/pemerintah yang membuang sampah langsung ke TPSA dikenakan tarif per M3

2. Pembuangan sampah di TPSA:

a) Pihak swasta	Rp	20.000,-/m3
b) Biaya administrasi	Rp	5.000,-

Pasal 65

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	WNI	WNA
1	Kartu Tanda Penduduk (WNI)	gratis	85.000-
2	Kartu Keluarga (KK)	gratis	35.000-
3	Surat keterangan Tinggal Sementara (SKTS) -> 6 Bulan	12.000,-	-
4	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) -> WNA	-	150.000,-
5	Kutipan Kedua Akta Kelahiran dst	25.000,-	82.000,-
6	Akta Perkawinan		
	a. di dalam kantor	72.000,-	162.000,-
	b. diluar kantor	107.000,-	215.000,-
7	Kutipan Kedua Akta Perkawinan dst	66.000,-	122.000,-
8	Akta perceraian	62.000,-	117.000,-
9	Kutipan Kedua Akta Perceraian dst	66.000,-	122.000,-
10	Akta Kematian	11.000,-	25.000,-
11	Kutipan Kedua Akta Kematian dst	17.000,-	34.000,-
12	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	62.000,-	117.000,-
13	Kutipan Kedua Akta Pengakuan dst	66.000,-	122.000,-
14	Akta Pengangkatan Anak/Adopsi	62.000,-	117.000,-
15	Kutipan Kedua Akta Pengakuan/Adopsi dst	66.000,-	122.000,-
16	Akta Perubahan Ganti Nama	62.000,-	117.000,-
17	Kutipan Kedua Akta Perubahan / Ganti Nama dst	66.000,-	122.000,-
18	Tanda Bukti Laporan Perkawinan	65.000,-	150.000,-
19	Tanda Bukti Keterangan Perkawinan	65.000,-	150.000,-

Pasal 67

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal68

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pemakaman adalah sebagai berikut:

a. pelayanan penyediaan tanah untuk masa 5 (lima) tahun sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

b. pelayanan pengangkutan mayat/jenazah:

1. dalam kota dihitung minimal 2 (dua) jam sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. luar kota dihitung sebesar 1 (satu) kilometer dikenakan biaya sebesar 1 (satu) liter bahan bakar, minimal diperhitungkan jarak 25 (dua puluh lima) kilometer
3. untuk luar kota yang harus menginap biaya penginapan dan uang makan bagi pengemudi dan pembantunya sampai ditempat tujuan ditanggung oleh penyewa sepenuhnya

c. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

d. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

e. pelayanan penitipan mayat/jenazah di rumah duka sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 69

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 70

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

a. struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk sekali parkir dengan waktu parkir maksimum selama 3 (tiga) jam, sebagai berikut:

1. roda 2 (dua) Rp 1.000,-
2. roda 4 (empat) Rp 2.000,-
3. roda lebih dari 4 (empat) Rp 4.000,-
4. roda lebih dari 6 (enam) Rp 5.000,-

b. kurang dari 3 (tiga) jam dihitung sama dengan 3 (jam) dan lebih dari 3 (tiga) jam dikenakan tambahan tarif perjam sebagai berikut:
1. roda 2 (dua) Rp 500,-
2. roda 4 (empat) Rp 1.000,-
3. roda lebih dari 4 (empat) Rp 1.000,-
4. roda lebih dari 6 (enam) Rp 1.000,-

Pasal 71

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

a. tarif retribusi pasar

1. tarif retribusi pasar tradisional
   a) toko/ kios kelompok I Rp 400,-/m²/hari

b) toko/ kios kelompok II Rp 350,-/m²/hari
c) toko/ kios kelompok III, Rp 250,-/m²/hari

2. yang dimaksud kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, adalah sebagai berikut:

a) kelompok I meliputi: logam mulia, permata, elektronik, onderdil, jasa perkantoran, salon, wartel, bioskop, tempat bermain dan rumah makan
b) kelompok II meliputi: jam tangan, kaca mata, kaset dan sejenisnya, kain/ bahan/ pakaian, kelontong, langsan, sepatu/ sandal, obat-obatan, alat tulis, kosmetik, alat-alat listrik, daging dan ikan basah/ kering.
c) kelompok III meliputi: tanaman hias, ikan hias, unggas, hasil pertanian, hasil kerajinan (grabah), hiasan atau pernak-pernik, sepuh emas dan sol sepatu

3. tarif retribusi pasar untuk Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di pasar tradisional ditetapkan sebesar Rp 500,-/m²/hari untuk semua jenis dagangan

4. tarif retribusi pasar induk
a) toko/ ilos sayuran/ buah Rp 500,-/m²
b) toko/ ilos primer Rp 300,-/m²
c) toko/ ilos sekunder Rp 400,-/m²

5. Tarif retribusi pasar induk untuk PKL ditetapkan sebesar Rp 1.500,-/3m²/ hari untuk semua jenis dagangan

b. tarif retribusi tempat parkir di pasar:
1. sepedamotor Rp 1.000,-/parkir
2. sedan/ jeep/ pick up/ minibus dan sejenisnya Rp 2.000,-/parkir
3. kendaraan roda empat (jenis box) Rp 3.000,-/parkir

4.	kendaraan roda enam (jenis box)	Rp	5.000,-/parkir
5.	bus, truk dan sejenisnya	Rp	5.000,-/parkir
6.	truk gandeng dan container	Rp	6.000,-/parkir
7.	trailer	Rp	7.000,-/parker

c. tarif retribusi penggunaan sarana mandi cuci kakus (MCK) di pasar sebesar Rp 1.000,-/orang

Pasal73

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

a. pengujian berkala pertama:

1. Mobil angkutan barang dan khusus (klasifikasi berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan/ JBB):

a) s/d 4.999kg Rp 35..000,-
b) 5.000 s/d 5.999 kg Rp 50.000,-
c) 6.000s/d8.999kg Rp 75.000,-
d) 9.000s/d 15.999kg Rp 100.000,-
e) 16.000 s/d keatas Rp 125.000,-

2. mobil angkutan orang (klasifikasi berdasarkan jumlah tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi)
   a) s/d 9 tempat duduk/ status umum Rp 35000,-
   b) 10 tempat duduk s/d 16 tempat duduk Rp 50.000,-
   c) 17 tempat duduk s/d 26 tempat duduk Rp 75.000,-
   d) 27 tempat duduk s/d 60 tempat duduk Rp 100.000,-
   e) 61 tempat duduk s/d keatas Rp 125.000,-

3. pengecatan tanda samping Rp 5.000,-
4. buku ujiRp 15.000,-
5. tanda uji sepasang Rp 10.000,-

b. Pengujian berkala perpanjang

1. Mobil angkutan barang dan khusus (klasifikasi berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan/ JBB)
   a) s/d 4.999 kg Rp 15.000,-
   b) 5.000 s/d 5.999 kg Rp 20.000,-
   c) 6.000 s/d 8.999 kg Rp 25.000,-
   d) 9.000 s/d 15.999 kg Rp 30.000,-
   e) 16.000 s/d keatas Rp 40.000,-

2. Mobil angkutan orang (klasifikasi berdasarkan jumlah tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi) Rp 10.000,-
   a) s/d 9 tempat duduk/ status umum Rp 15.000,-
   b) 10 tempat duduk s/d 16 tempat duduk Rp 20.000,-
   c) 17 tempat duduk s/d 26 tempat duduk Rp 25.000,-
   d) 27 tempat duduk s/d 60 tempat duduk Rp 30.000,-
   e) 61 tempat duduk s/d keatas Rp 40.000,-

3. Pengecatan tanda samping Rp 5.000,-
4. Buku ujiRp 15.000,-
5. Tanda uji sepasang Rp 10.000,-

c. Penggantian tanda bukti uji yang rusak/ hilang Rp 30.000,-

d. Penilaian kondisi teknis

1. Mobil angkutan barang dan khusus (klasifikasi berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan/ JBB) Rp 25.000,-
   a) s/d 4.999 kg Rp 35.000,-
   b) 5.000 s/d 5.999 kg Rp 40.000,-
   c) 6.000 s/d 8.999 kg Rp 50.000,-
   d) 9.000 s/d 15.999kg Rp 65.000,-
   e) 16.000 s/d keatas Rp 70.000,-
2. Mobil angkutan orang (klasifikasi berdasarkan jumlah tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi) Rp 25.000,-
   a) s/d 9 tempat duduk/ status umum Rp 35.000,-
   b) 10 tempat duduk s/d 16 tempat duduk Rp 40.000,-
   c) 17 tempat duduk s/d 26 tempat duduk Rp 50.000,-
   d) 27 tempat duduk s/d 60 tempat duduk Rp 65.000,-
   e) 61 tempat duduk s/d keatas Rp 70.000,-
3. Sepeda motor Rp 30.000,-

e. Uji ulang Rp 50.000,-

Pasal75

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:

a.	pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran:		
	1. hydrant kebakaran	Rp	20000,-/titik
	2. selang dan nozle	Rp	10.000,-/roll
	3. spinkler	Rp	2.000,-/titik
	4. alarm sistem		
	a) otomatis (smoke dan heat detector)	Rp	4.000,-/titik
	b) manual	Rp	4.000,-/titik
b.	pemeriksaan alat pemadam kebakaran		
	1. Jenis Busa		
	a) 9 s/d 25 lt	Rp	5.000,-/titik
	b) 26 s/d 50 lt	Rp	6.000,-/titik
	c) 51 s/d 150 lt	Rp	7.000,-/titik
	d) 151 s/d 200 lt	Rp	8.000,-/titik
	e) Lebih dari 200 lt	Rp	9.000,-/titik
	2. Jenis Co2 (Carbon Dioksida)		
	a) 0,5 s/d 5kg	Rp	5.000,-/tabung
	b) 6 s/d 10 kg	Rp	6.000,-/tabung

c) 11 s/d 20 kg Rp 7.000,-/tabung
d) 21 s/d 30 kg Rp 8.000,-/tabung
e) Lebih dari 30 kg Rp 9.000,-/tabung

3. Jenis Kimia Kering (Dry Chemical)
a) 0,5 s/d 5 kg Rp 5000,-/tabung
b) 6 s/d 10kg Rp 6.000,-/tabung
c) 11 s/d20kg Rp 7000,-/tabung
d) 21 s/d 30kg Rp 8.000,-/tabung
e) Lebih dari 30kg Rp 9.000,-/tabung

4. Jenis Hallotron
a) 0,5 s/d 5kg Rp 5.000,-/tabung
b) 6 s/d 10 kg Rp 6.000,-/tabung
c) 11 s/d 20kg Rp 7000,-/tabung
d) 21 s/d 30 kg Rp 8.000,-/tabung
e) Lebih dari 30 kg Rp 9.000,-/tabung

c. pemeriksaan kelengkapan pokok mobil pemadam kebakaran:

1. mobil pemadam Rp 60.000,-/buah
2. motor pompa portable Rp 40.000,-/buah
3. peralatan pernapasan / briting aparatus Rp 50.000,-/buah

d. pemeriksaan peralatan pompa pemadam kebakaran:

1. pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel Rp 60.000,-/buah
2. pompa kebakaran dengan penggerak listrik Rp 20.000,-/buah

Pasal77

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayananan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Master Plan/ Site Plan

Pasal 78

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak master plan/site plan adalah sebagai berikut:

a.	pengukuran peta bidang tanah	Rp 100,-/m^2
b.	retribusi penggantian biaya cetak peta master plan/site plan:	
	1. ukuran A0	Rp 160.000,-/lembar
	2. ukuran A1	Rp 120.000,-/lembar
	3. ukuran A2	Rp 80.000,-/lembar
	4. ukuran A3	Rp 40.000,-/lembar

Pasal 79

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan penggantian biaya cetak peta masterplan/siteplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 80

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah Rp.10.000,-/ m3.

Pasal81

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 82

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair adalah sebagai berikut:

indeks lokasi	zona industri	5
	zona perkotaan	4
	zona perumahan	3
indeks gangguan	kimia logam	5
	kimia non logam	4
	biologi	3

Harga dasar

1. limbah minyak Rp1.000,-/M3
2. limbah kimia cair Rp 500,-/M3

Pasal83

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf I

Balai Latihan Kerja

Pasal84

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pendidikan di BLK (Balai Latihan Kerja) adalah sebagai berikut:

a. tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelatihan dan jangka waktu pelaksanaan pelatihan kerja.

b. tarif retribusi pelatihan kerja pada BLK yang dilaksanakan di dalam BLK:

1. Kejuruan Otomotif:
   a) Sepeda motor — Rp 1.800,-/jam/siswa;
   b) Mobil bensin — Rp 1.800,-/jam/siswa;
   c) Mobil diesel — Rp 1.500,-/jam/siswa;
   d) Ketok duko/cat — Rp 1.500,-/jam/siswa;
   e) Stir mobil & mekanik — Rp 30.000,-/jam/siswa.
2. Kejuruan Listrik:
   a) Instalasi penerangan — Rp 1.600,-/jam/siswa;
   b) Instalasi tenaga — Rp 1.600,-/jam/siswa;
   c) Instalasi pendingin — Rp 1.700,-/jam/siswa;
   d) Elektronika — Rp 1.600,-/jam/siswa;
   e) Teknisi handphone — Rp 2.000,-/jam/siswa;
   f) Wekel/dinamo — Rp 1.700,-/jam/siswa;
   g) Teknisi komputer — Rp 2.500,-/jam/siswa.
3. Kejuruan Teknologi Mekanik:
   a) Las listrik — Rp 2.100,-/jam/siswa;
   b) Las karbit — Rp 1.700,-/jam/siswa;
   c) Plat dan tempa — Rp 1.600,-/jam/siswa;
   d) Pandai besi — Rp 1.600,-/jam/siswa;
   e) Mesin logam/bubut — Rp 2.000,-/jam/siswa
4. Kejuruan Bangunan:
   a) Bangunan kayu — Rp 1.800,-/jam/siswa;
   b) Bangunan batu — Rp 1.800,-/jam/siswa;
   c) Mebel — Rp 1.700,-/jam/siswa.
5. Kejuruan Pertanian dan Peternakan:
   a) Pengolahan hasil pertanian — Rp 1.600,-/jam/siswa;
   b) Tata boga — Rp 1.700,-/jam/siswa;
   c) Peternakan unggas — Rp 1.600,-/jam/siswa.
6. Kejuruan Tata Niaga:
   a) Operator komputer (umum) — Rp 1.700,-/jam/siswa;
   b) Operator komputer (privat) — Rp 3.400,-/jam/siswa;
   c) Pengenalan internet — Rp 2.500,-/jam/siswa;
   d) Administrasi perkantoran — Rp 1.500,-/jam/siswa;
   e) Sekretaris — Rp 1.500,-/jam/siswa;
   f) Perhotelan — Rp 1.700,-/jam/siswa.

7. Aneka Kejuruan:
   a) Jahit pakaian Rp 1.700,-/jam/siswa;
   b) Jahit sarung tangan Rp 2.000,-/jam/siswa;
   c) Bordir Rp 1.700,-/jam/siswa;
   d) Tata rias rambut & wajah Rp 1.800,-/jam/siswa;
   e) Tata rias pengantin Rp 2.000,-/jam/siswa;
   f) Ukir kayu Rp 1.500,-/jam/siswa.

c. tarif retribusi pelatihan kerja pada BLK yang dilaksanakan di luar BLK dengan metode mobile training unit, ditetapkan rumus retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah biaya transport pengangkutan dan biaya transport instruktur.

d. biaya transport pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c:

1. Kejuruan Otomotif:
   a) Sepeda motor Rp 525.000,-/paket;
   b) Stir mobil & mekanik Rp 375.000,-/paket.
2. Kejuruan Listrik:
   a) Elektronika Rp 375.000,-/paket;
   b) Teknisi handphone Rp 375.000,-/paket.
3. Kejuruan Teknologi Mekanik (las Karbit)
   a) Las karbit Rp 525.000,-/paket.
4. Kejuruan Bangunan:
   a) Mebel Rp 525.000,-/paket.
5. Kejuruan Pertanian dan Peternakan:
   a) Pengolahan hasil pertanian Rp 525.000,-/paket.
6. Kejuruan Tata Niaga:
   a) Administrasi perkantoran Rp 375.000,-/paket.
7. Aneka Kejuruan:
   a) Jahit pakaian Rp 525.000,-/paket;
   b) Jahit sarung tangan Rp 525.000,-/paket;
   c) Bordir Rp 525.000,-/paket;
   d) Tata rias rambut & wajah Rp 525.000,-/paket.

e. biaya transport instruktur sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan sebesar Rp 50.000,- per orang hari.

Paragraf 2

Pelatihan Kesehatan

Pasal85

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pendidikan daiam pelatihan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. pelatihan P3K per paket max. 25 orang selama 8 jam	Rp 3.000.000,-
b. pelatihan penggunaan APD per paket paling banyak 15 orang selama 8 jam	Rp 2.300.000,-
c. pelatihan upaya kesehatan kerja paling banyak 20 orang	Rp 2.000.000,-

Pasal 86

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah Rp 2.000.000,-/operator

Pasal 88

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas

Struk tur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pemakaian Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasos/Fasum)

Pasal 89

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. fasos/fasum perumahan

No	Struktur Bangunan	Tarif Retribusi Sewa
1	Sarana Pendidikan	Rp 2.500,-/m2/tahun
2	Sarana Olah Raga	Rp 2.500,-/m2/tahun
3	Sarana Niaga Komersial	Rp 2.500,-/m2/tahun
4	Sarana Ibadah	Rp 1.250,-/m2/tahun × 30%

b. penggunaan alat-alat berat, yaitu:

1.	mesin gilas kapasitas 4 s/d 6 ton	Rp	75.000,-/hari
2.	mesin gilas kapasitas 6 s/d 8 ton	Rp	90.000,-/hari
3.	mesin gilas kapasitas 8 s/d 10 ton	Rp	125.000,-/hari
4.	mesin gilas kapasitas 10 s/d 12 ton	Rp	150.000,-/hari
5.	buldozer kapasitas 1,5 m^3	Rp	90.000,-/jam
6.	buldozer kapasitas 1 m^3	Rp	75.000,-/jam
7.	excavator kapasitas 0,75 s/d 0,90 m^3	Rp	90.000,-/jam
8.	concrate mixer	Rp	65.000,-/hari
9.	stemper Rp 45.000,-/hari		
10.	vibro sv 50 s/d 28 ton	Rp	90.000,-/jam
11.	compressor	Rp	110.000,-/hari

c. penggunaan kendaraan besar:

1.	dump truk 3,5 s/d5ton	Rp	315.000,-/hari
2.	truk hino5 ton	Rp	315.000,-/hari
3.	low bed 30 s/d 40 ton/ alat angkutan alat berat:		
	a) 0 km s/d 20 km	Rp	1.000.000,-/pp
	b) lebih dari 20 km	Rp	2.000.000,-/pp

d. penggu naan alat-alat laboratorium jalan-jembatan:

1.	extracture test	Rp	200.000,-/sampel
2.	sordir	Rp	750.000,-/titik
3.	cbr laboratorium	Rp	50.000,-/sampel
4.	cbr lapangan	Rp	75.000,-/titik
5.	compaction test/ dcp	Rp	750.000,-/titik
6.	Sand cone test	Rp	75.000,-/200 m
7.	Cone drill test	Rp	75.000,-/ 200 m
8.	Uji mutu bahan material	Rp	300.000,-/sampel
9.	Sand equivalent test	Rp	75.000,-/titik
10.	Tiest beton	Rp	15.000,-/kubus
	a. Concrate hammer test	Rp	25.000,-/titik

e. penggunaan alat berat:

no	jenis alat merk/ tipe	sewa/jam (Rp)	sewa/hari (Rp)	sewa/bulan (Rp)
1	concrete mixer golden star	1.500,-	10.500,-	162.500,-
2	asphal spayer bukaka	5.000,-	35.000,-	875.500,-
3	asphal tanker isuzu	7.500,-	52.500,-	1.312.500,-
4	fuel tanker toyota	6.500,-	45.500,-	1.337.500,-
5	water tanker toyota	10.000,-	70.000,-	1.750.000,-
6	air compressor atlas copco	15.000,-	105.000,-	2.625.000,-
7	buldozer fiatalis wheel loader	30.000,-	210.000,-	5.250.000,-
8	buhar roller tanden	25.000,-	175.000,-	4.375.000,-
9	vibr 6 ton barata	6.500,-	45.500,-	1.137.500,-
10	road roller 8 ton (tire roller) barata	6.000,-	42.000,-	1.050.000,-
11	road roller 8 ton akai	7.000,-	49.000,-	1.225.000,-
12	road roller 10 ton	7.500,-	52.500,-	1.312.500,-
13	anugrah road roller 12 ton barata	7.500,-	52.500,-	1.312.500,-
14	road roller vibr 2,5 ton barata	2.500,-	17.500,-	437.500,-
15	road roller vibr 1 ton barata	1.500,-	10.500,-	262.500,-
16	roller pedester vibr case	2.500,-	17.500,-	437.500,-
17	dump truct (hino5 ton)	15.000,-	105.000,-	2.625.000,-
18	dump truct (isuzu 3,5 ton)	12.500,-	87.500,-	2.187.500,-
19	asphal finsher anugrah	25.000,-	175.000,-	4.375.000,-
20	tyre roller anugrah	20.000,-	140.000,-	3.500.000,-
21	motor grader linhof	10.950,-	76.650,-	273.750,-
22	vibro plate barata	935,-	6.545,-	163.325,-
23	stamper barata stone cruser	845,-	5.915,-	147.875,-
24	vibrating koller	17.650,-	123.500,-	3.088.750,-
25	sakai zoton	30.000,-	210.000,-	5.250.000,-

f. pelayanan laboratorium pengujian jalan dan jembatan:

No	jenis alat pengujian laboratorium	biaya (Rp)	keterangan
1	ectrakture test	75.000,-	per sampel bahan material
2	sondir	500.000,-	per titik
3	cbr laboratory set	15.000,-	per sampel bahan material
4	cbr on place	25.000,-	per titik
5	compaction set	50.000,-	per titik
6	sand density	50.000,-	per 200 meter
7	core drill set	50.000,-	per 200 meter
8	grandation tester	25.0.000,-	per sampel bahan material
9	sand wquivalent testing	50.000,-	per titik
10	concrate blok tester	5.000,-	per kubus beton

g. sewa gedung Sartika Rp. 1.250.000,- per hari.

Pasal 90

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi RPH

Pasal 91

Struktur dan besarnya tarif retribusi RPH adalah sebagai berikut:

1. RPH Pemerintah
   a. Jasa pemakaian RPH dan pemeriksaan hewan Rp 20.000,-/ekor
   b. Sewa pemakaian kandang di lokasi RPH Rp 3.000,-/ekor/hari
   c. Jasa Pemakaian Laboratorium Kesehatan Masyarakat veteriner Rp100.000,-/sample

2. RPH Swasta
   a. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan ante-mortern dan post-mortern tenak besar Rp 15.000,-/ekor
   b. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan ante-mortern dan post-mortern tenak kecil Rp 5.000,-/ekor

3. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU)

a.	Jasa pemeriksaan hewan antemortern dan post-mortern tenak besar (Sapi/ Kerbau)	Rp 15.000,-/ekor
b.	Jasa pemeriksaan hewan antemortern dan post-mortern tenak kecil (Kambing/ Domba)	Rp 2.000,-/ekor

4. Jasa pemerik saan kesehatan hewan

a.	Hewan Besar (Sapi/ Kerbau)	Rp 5.000,-/ekor
b.	Hewan Kecil (Kambing/ Domba)	Rp 1.000,-/ekor

5. Jasa pemeriksaan daging laboratorium kesmavet

a.	Jumlah s/d 100kg sebanyak1 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan	Rp 50.000,-/sampel
b.	Jumlah 100- 1.000 kg sebanyak5 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan	Rp 75.000,-/sampel
c.	Jumlah lebih dari 1.000 kg sebanyak 10 sampel jenis pemeriksaan makroskopis, pH, uji kebusukan, total place count (TPC) (pindah di bawah 1.C)	Rp100.000,-/sampel

6. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan

a.	Komoditas ternak lokal	
	1) Sapi/ Kerbau	Rp 2.500,-/ ekor
	2) Kambing/ domba	Rp 1.000,-/ekor
	3) Babi	Rp 10.000,-/ ekor
b.	Komoditas ternak impor	
	1). Sapi/ Kerbau	Rp 5.000,/ekor
	2). Kambing/ domba	Rp 5.000,/ekor
	3). Babi	Rp 15.000,-/ekor

c. Komoditas ternak unggas

1)	Unggas dewasa	Rp	500,-/ekor
2)	DOC (Day Old Chicken/ umur sehari)	Rp	500,-/ekor

Pasal 92

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Pelayanan Terminal

Pasal 93

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan terminal adalah sebagai berikut:

a. retribusi terminal kendaraan bus umum atau non bus angkutan penumpang perangkutan setiap kali masuk terminal:

1.	bus antar kota antar propinsi (AKAP)	Rp 3.000,-
2.	bus antar kota dalam propinsi (AKDP)	
	a) bus cepat/ patas/ non ekonomi	Rp 3.000,-
	b) bus ekonomi	Rp 2.000,-
3.	bus sedang:	
	a) tempat duduk 12 s/d 15	Rp 1.500,-
	b) tempat duduk 16 s/d 24	Rp 2.000,-

4. angkutan kota (angkot) Rp 1.500,-

b. peron (setiap orang masuk terminal) Rp 1.000,-

c. fasilitas terminal
   1. retribusi kebersihan
      a) bus umum Rp 2000,-
      b) angkutan kota (angkot) Rp 1.000,-
      c) los/ kios/ toko/ rumah makan/ tempat penjualan karcis bus Rp 1.500,-

   2. retribusi penggunaan fasilitas mandi cuci kakus (mck)
      a) Mandi dan cuci Rp 2.000,-
      b) Buang air besar/ kecil Rp 1.000,-

   3. Los/ kios/ toko/ rumah makan/ tempat penjualan karcis bus Rp 2000,-

d. parkir di terminal
   1. kendaraan roda 4 (empat) Rp 2.000,-
   2. kendaraan roda 2 (dua) Rp 1.000,-

Pasal 94

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 95

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, adalah sebagai berikut:

a.	kendaraan roda dua (motor)	Rp 1.000,-/parkir
b.	kendaraan roda dua (mobil)	Rp 2.000,-/ parkir

Pasal 96

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 97

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian kolam renang:

1. Perorangan:

a.	Hari biasa	Rp	1.500,-/orang
b.	Hari libur	Rp	2.000,-/orang
c.	Malam hari	Rp	5.000,-/orang

2. Rombongan sekolah dan perguruan tinggi empat kali sebulan, setiap rombongan paling sedikit 20 orang — Rp 2.000,-/orang/1½ jam

3. Rombongan instansi/kantor/ umum empat kali sebulan paling sedikit 20 orang — Rp 4.000,-/orang/1½ jam

4. Rombongan PRSI (induk organisasi olah raga) untuk latihan empat kali sebulan — Rp 20.000,-/grup/2 jam

5. Untuk pertandingan — Rp 200.000,-/6 jam

6. Langganan perorangan (delapan kali sebulan) — Rp 10.000,-/orang/1½ jam

7. Kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 30.000,-/2 jam

b. pemakaian gedung olahraga (GOR):

1. Bulu tangkis/sepak takraw:

a. Induk organisasi olah raga:

1)	Untuk latihan	Rp	4.000,-/lap./2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	8.000,-/lap./2 jam

b. Sekolah/perguruan tinggi:

1)	Untuk latihan	Rp	3.000,-/lap./2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	5.000,-/lap./2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum:

1)	Untuk latihan	Rp	5.000,-/lap./2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	10.000,-/lap./2 jam

d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 10.000,-/lap./2 jam

2. tenis meja:

a. Induk organisasi olah raga:

1)	Untuk latihan	Rp	3.000,-/meja/2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	4.000,-/meja/2 jam

b. Sekolah/perguruan tinggi:

1)	Untuk latihan	Rp	2.000,-/meja/2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	3.000,-/meja/2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum:

1)	Untuk latihan	Rp	4.000,-/meja/2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	8.000,-/meja/2 jam

d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 10.000,-/meja/2 jam

3. Bola voli:

a. Induk organisasi olah raga:

1)	Untuk latihan	Rp	5.000,-/lap./2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	9.000,-/lap./2 jam

b. Sekolah/perguruan tinggi:

1)	Untuk latihan	Rp	4.000,-/lap./2 jam
2)	Untuk pertandingan	Rp	7.000,-/lap./2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum:
   a) Untuk latihan — Rp 6.000,-/lap./2 jam
   b) Untuk pertandingan — Rp 11.000,-/lap./2 jam

d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 20.000,-/lap./2 jam

4. Bola basket/futsal:

a. Induk organisasi olah raga:
   1) Untuk latihan — Rp 6.000,-/lap./2 jam
   2) Untuk pertandingan — Rp 10.000,-/lap./2 jam

b. Sekolah/perguruan tinggi:
   1) Untuk latihan — Rp 5.000,-/lap./2 jam
   2) Untuk pertandingan — Rp 8.000,-/lap./2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum:
   1) Untuk latihan — Rp 7.000,-/lap./2 jam
   2) Untuk pertandingan — Rp 12.000,-/lap./2 jam

d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 30.000,-/lap./2 jam

5. Senam:

a. Induk organisasi olah raga paling banyak 20 orang
   1) Untuk latihan — Rp 5.000,-/2 jam
   2) Untuk pertandingan — Rp 8.000,-/2 jam

b. Sekolah/perguruan tinggi paling banyak 20 orang
   1) Untuk latihan Rp 3.000,-/2 jam
   2) Untuk pertandingan Rp 5.000,-/2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum paling banyak 20 orang
   1) Untuk latihan Rp 5.000,-/2 jam
   2) Untuk pertandingan Rp 10.000,-/2 jam

d. Penggunaan piano dan alat-alat senam Rp 7.000,-/2 jam

e. Pemakaian oleh sanggar senam Rp 10.000,-/2 jam

f. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 30.000,-/2 jam

6. Karate, judo, pencak silat dan bela diri lainnya:

a. Induk organisasi olah raga:
   1) Untuk latihan Rp 5.000,-/2 jam
   2) Untuk pertandingan Rp 8.000,-/2 jam

b. Sekolah/perguruan tinggi:
   1) Untuk latihan Rp 3.000,-/2 jam
   2) Untuk pertandingan Rp 6.000,-/2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum:
   1) Untuk latihan Rp 6.000,-/2 jam
   2) Untuk pertandingan Rp 10.000,-/2 jam

d. Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 5.000,-/2 jam

7. Pemakaian prasarana olah raga air:

a.	Tempat berlabuh:		
	1) Speed boat tujuh meter ke atas	Rp	40.000,-/hari
	2) Speed boat tujuh meter ke bawah	Rp	30.000,-/hari
	3) Sewa dok/galangan	Rp	10.000,-/ hari
b.	Gedung induk	Rp	150.000,-/6 jam
c.	Plaza gedung induk	Rp	100.000,-/6 jam
d.	Pembuatan film	Rp	200.000,-/hari
e.	Peluncuran speed boat	Rp	40.000,-/1 kali
	Setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp	10.000,-/2 jam

8. Lapangan menembak:

a.	Smallbore/free pistol	Rp	5.000,-/2 jam/orang
b.	Centre fire pistol	Rp	5.000,-/2 jam/orang
c.	Rapid fire pistol	Rp	5.000,-/2 jam/orang
d.	Big bore	Rp	5.000,-/2 jam/orang
e.	Clay pigeon untuk:		
	1) 1 orang	Rp	5.000,-/2 jam
	2) 2 orang	Rp	7.000,-/2 jam
	3) 3 orang	Rp	9.000,-/2 jam
	4) 4 orang	Rp	12.000,-/2 jam
	5) 5 orang	Rp	15.000,-/2 jam
	6) 6 orang	Rp	17.000,-/2 jam
f.	Langganan dengan fasilitas lapangan dan sasaran tertentu yang diinginkan maksimal 8 kali sebulan tiap-tiap jenis kegiatan	Rp	25.000,-/latihan
g.	Rombongan tiapjenis paling banyak 20 orang	Rp	60.000,-/6 jam

h.	Senapan angin perorangan	Rp	5.000,-/2 jam

9. Catur:

a.	Untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 4 jam:		
	1) Untuk latihan pagi hari	Rp	7.500,-/4 jam
	2) Untuk latihan sore hari	Rp	10.000,-/4 jam
b.	Untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 10 jam pertandingan	Rp	30.000,-/10 jam
c.	Pertandingan dua regu (persahabatan)	Rp	20.000,-/10 jam
d.	Langganan:		
	1) Latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp	40.000,-/4 jam
	2) Latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp	50.000,-/4 jam
e.	Setiap pemakaian AC	Rp	50.000,-/4 jam
f.	Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp	20.000,-/2 jam

10. Bridge:

a.	Untuk 10 meja paling lama 4 jam:		
	1) Untuk latihan pagi hari	Rp	15.000,-/4 jam
	2) Untuk latihan sore hari	Rp	25.000,-/4 jam
b.	Untuk 10 meja paling lama 10 jam	Rp	50.000,-/10 jam

c.	Pertandingan dua regu (persahabatan)	Rp	30.000,-/6 jam
d.	Langganan:		
	1) Latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp	30.000,-/4 jam
	2) Latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp	40.000,-/4 jam
e.	Setiap pemakaian AC	Rp	50.000,-/4 jam
f.	Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp	15.000,-/2 jam

11. Tennis indoor (rai'bond ice):

a.	Induk organisasi olah raga:		
	1) Latihan pagi/siang hari	Rp	22.500,-/lap./2 jam
	2) Latihan sore/malam hari	Rp	45.000,-/lap./2 jam
	3) Pertandingan	Rp	60.000,-/lap./2 jam
b.	Sekolah/perguruan tinggi:		
	1) Latihan pagi/siang hari	Rp	20.000,-/lap./2 jam
	2) Latihan sore/malam hari	Rp	40.000,-/lap./2 jam
	3) Pertandingan	Rp	50.000,-/lap./2 jam
c.	Masyarakat/instansi/umum:		
	1) Latihan pagi/siang hari	Rp	32.500,-/lap./2 jam
	2) Latihan sore/malam hari	Rp	65.000,-/lap./2 jam
	3) Untuk pertandingan	Rp	100.000,-/lap./2 jam
d.	Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp	20.000,-/lap./2 jam

12. Squash:
    a. Induk organisasi olah raga:
        1) Latihan pagi/siang hari — Rp 22.500,-/lap./2 jam
        2) Latihan sore/malam hari — Rp 45.000,-/lap./2 jam
        3) Pertandingan — Rp 60.000,-/lap./2 jam

    b. Sekolah/perguruan tinggi:
        1) Latihan pagi/siang hari — Rp 20.000,-/lap./2 jam
        2) Latihan sore/malam hari — Rp 40.000,-/lap./2 jam
        3) Pertandingan — Rp 50.000,-/lap./2 jam

    c. Masyarakat/instansi/umum:
        1) Latihan pagi/siang hari — Rp 32.500,-/lap./2 jam
        2) Latihan sore/malam hari — Rp 65.000,-/lap./2 jam
        3) Pertandingan — Rp 100.000,-/lap./2 jam
    d. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 20.000,-/lap./2 jam

c. Pemakaian stadion olah raga:
1. Stadion sepak bola:
    a. Penggunaan oleh induk organisasi olah raga untuk:
        1) Latihan pagi/sore — Rp 30.000,-/1,5 jam
        2) Pertandingan — Rp 50.000,-/2 jam
        3) Latihan siang hari — Rp 20.000,-/1,5 jam

    b. Sekolah/perguruan tinggi:
        1) Latihan pagi/sore — Rp 25.000,-/1,5 jam
        2) Pertandingan — Rp 40.000,-/2 jam
        3) Latihan siang hari — Rp 15.000,-/1,5 jam

    c. Masyarakat/instansi/umum:
        1) Latihan pagi/sore — Rp 75.000,-/1,5 jam
        2) Pertandingan — Rp 100.000,-/2 jam
        3) Latihan siang hari — Rp 25.000,-/1,5 jam

d. Setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 250.000,-/2 jam

2. Stadion soft ball/base ball untuk:

a. Induk organisasi olah raga:

1) Latihan pagi/sore	Rp	10.000,-/2 jam
2) Pertandingan	Rp	20.000,-/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp	5.000,-/2 jam

b. Sekolah/perguruan tinggi:

1) Latihan pagi/sore	Rp	7.500,-/2 jam
2) Pertandingan	Rp	15.000,-/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp	5.000,-/2 jam

c. Masyarakat/instansi/umum:

1) Latihan pagi/sore	Rp	15.000,-/2 jam
2) Pertandingan	Rp	25.000,-/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp	5.000,-/2 jam

d. Setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan — Rp 50.000,-/2 jam

d. Pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olahraga:

1. Pemakaian gedung olahraga:

a.	Gedung catur	Rp	600.000,-/5 jam
b.	Gedung bridge	Rp	600.000,-/5 jam
c.	Gedung tenis meja	Rp	400.000,-/5 jam
d.	Gedung bulu tangkis	Rp	500.000,-/5 jam
e.	Gedung basket	Rp	600.000,-/5 jam
f.	Gedung bela diri	Rp	400.000,-/5 jam

g.	Gedung olahraga dan gelanggang remaja	Rp	850.000,-/5 jam
h.	Stadion olahraga	Rp	850.000,-/5 jam
i.	Kolam renang	Rp	850.000,-/5 jam
j.	Gedung auditorium	Rp	600.000,-/5 jam
k.	Gedung serba guna	Rp	500.000,-/5 jam
l.	Gedung teater	Rp	1.000.000,-/5 jam

2. Pemakaian gelanggang remaja kecamatan:

a.	Standar lama	Rp	250.000,-/5 jam
b.	Standar baru	Rp	400.000,-/5 jam

3. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25%.

e. Pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:

1. Peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:

a.	Satu unit sound system	Rp	75.000,-/5 jam
b.	Satu buah meja panjang	Rp	7.500,-/5 jam
c.	Satu buah panel/sketsel	Rp	5.000,-/5 jam
d.	Panggung auditorium	Rp	75.000,-/5 jam
e.	Satu set tape recorder	Rp	20.000,-/5 jam
f.	Satu set perangkat gamelan	Rp	100.000,-/5 jam
g.	Satu buah meja/lavel	Rp	2.000,-/5 jam
h.	Satu set sofa	Rp	15.000,-/5 jam
i.	Satu set karpet	Rp	100.000,-/5 jam
j.	Satu buah kursi pernekel/jok	Rp	1.500,-/5 jam

2. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25%.

Pasal98

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB

Pasal99

Ketentuan penghitungan tarif retribusi IMB dihitung berdasarkan:

RIMB = LB × SHDB per M2 × Koefisien Lantai Bangunan × Persentase Guna Bangunan

Keterangan:

RIMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
LB = Luas Bangunan
SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan

Pasal 100

Ketentuan biaya ditetapkan sebagai berikut:

a. biaya pendaftaran 1 % dari nilai retribusi bangunan
b. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar, meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 6 % dari nilai retribusi bangunan
c. biaya pengawasan 10 % dari nilai retribusi bangunan
d. biaya sempadan 1 % dari nilai retribusi bangunan

Pasal 101

Penetapan koefisien lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah sebagai berikut:

No	Lantai Bangunan	Koefisien
1.	lantai *basement*	1,200
2.	lantai dasar	1,000
3.	lantai II	1,090
4.	lantai III	1,120
5.	lantai IV	1,135
6.	lantai V	1,162
7.	lantai VI	1,197
8.	lantai VII	1,236
9.	lantai VIII	1,265
10	setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah	0,030

Pasal 102

Penetapan persentase guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, untuk jenis-jenis bangunan adalah sebagai berikut:

No	Guna Bangunan	Persentase
1.	bangunan perdagangan jasa	3,00 %
2.	bangunan perindustrian	3,00%
3.	bangunan perumahan	1,00%
4.	bangunan rumah tinggal	1,00%
5.	bangunan pemerintah	1,00 %
6.	bangunan umum	3,00%
7.	bangunan pendidikan	2,00 %
8.	bangunan sosial	0,50 %
9.	bangunan sarana olah raga	2,00 %
10.	bangunan campuran	2.00 %
11.	bangunan-bangunan	3,00 %
12.	bangunan khusus	0,50 %
13.	bangunan rekreasi	3,00 %
14.	bangunan menara telekomunikasi	3,00 %
15.	bangunan lain-lain	1,50 %

Pasal 103

Terhadap perubahan struktur bangunan ditetapkan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

a. untuk memperbaiki dan merubah struktur bangunan 30% dari nilai retribusi bangunan
b. untuk izin perubahan tampak 10% dari nilai retribusi bangunan
c. pemutihan bangunan IMB sebesar 50% dari nilai retribusi bangunan

Pasal 104

(1) Terhadap bangunan rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) dengan rumah tipe 18 sampai dengan Tipe 36, yang biaya pembangunannya tidak melebihi dari harga satuan per meter persegi tertinggi untuk Pembangunan rumah dinas Tipe C yang berlaku, diberikan keringanan untuk tidak membayar retribusi IMB.

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas tanah tidak lebih dari 72 M2.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar harga dasar bangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 104 harus mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 107

Tarif retribusi terhadap izin gangguan dihitung dengan rumus:

RIG = (TL × IL × IG × LRTU)

RIG : Retribusi Izin Gangguan

TL : Tarif Lingkungan

Harga dasar tanah sesuai NJOP PBB × IZ (indeks Zona)

IZ : Indeks Zona yang berdasarkan peta tata ruang dan wilayah

a. NJOP Zona Industridan Jasa = 0,15%
b. NJOP Zona Permukiman = 0,30%
c. NJOP Zona Pertanian = 0,50%

IL : Indeks Lokasi yang berdasarkan pada Klasifikasi jalan

a. Jalan arteri (> 6 m) = 4
b. Jalan kolektor (4,1 s.d 6 m) = 3
c. Jalan lokal (2,1m s.d 4 m) = 2
d. Jalan lingkungan (< 2 m) = 1

IG : Indeks Gangguan yang timbul oleh kegiatan usaha:

a. gangguan besar = 3
b. gangguan sedang = 2
c. gangguan kecil = 1

LRTU : jumlah Luas Ruang Tempat Usaha adalah area yang digunakan sebagai tempat usaha dan area lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terhadap kelangsungan usaha tersebut, antara lain pelataran parkir, gudang terbuka.

Pasal 108

Termasuk di dalam tarif retribusi adalah biaya untuk pengawasan, peninjauan lokasi, pengukuran dan gambar/ denah lokasi, yang besaran biayanya secara teknis ditentukan oleh unit yang bersangkutan.

Pasal 109

Ketentuan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 108 diberlakukan pula terhadap:

a. permohonan izin gangguan baru;
b. permohonan perluasan kegiatan/ tempat usaha;
c. permohonan pindah tempat usaha.

Pasal 110

Dalam hal surat pemberian izin gangguan mengalami kerusakan atau hilang pemegang izin gangguan diwajibkan melapor dan mengajukan permohonan penggantian surat izin gangguan secara tertulis dengan dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per surat izin gangguan yang rusak atau hilang.

Pasal 111

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 samai dengan Pasal 110 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 112

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut:

a. Izin trayek untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp 135.000,-/5 tahun
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempatduduk)	Rp 155.000,-/5 tahun
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp 170.000,-/5 tahun
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp 185.000,-/5 tahun

b. Kartu pengawasan/ daftar ulang

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp 45.000,-/tahun
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk)	Rp 50.000,-/tahun
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp 55.000,-/tahun
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp 60.000,-/tahun

c. Izin trayek untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp 135.000,-/5 tahun
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk)	Rp 155.000,-/5 tahun
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp 170.000,-/5 tahun
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp 185.000,-/5 tahun

d. Kartu pengawasan/ daftar ulang

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp 45.000,-/tahun
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk)	Rp 50.000,-/tahun
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp 55.000,-/tahun
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp 60.000,-/tahun

e. Izin insidentil (angkutan orang)

1.	Mobil penumpang (1 s/d 8 tempat duduk)	Rp 45.000,-/kendaraan
2.	Mobil bus (9 s/d 16 tempat duduk)	Rp 50.000,-/kendaraan
3.	Mobil bus (17 s/d 26 tempat duduk)	Rp 55.000,-/kendaraan
4.	Mobil bus (lebih dari 27 tempat duduk)	Rp 60.000,-/kendaraan

Pasal 113

(1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua

Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal114

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut:

Perizinan bidang perikanan		
a.	Pemberian izin Usaha Perikanan (IUP) bidang Penangkapan Ikan.	
	1) IUP	
	2) Daftar ulang (Perpanjangan)	Rp. 100.000,-/izin
b.	Izin usaha pemasaran ikan dan olahan lainnya	Rp. 10.000,-/tahun
	1) Penampungan dan pengolahan ikan	
	2) Eksportir hasil pengolahan ikan	Rp. 100.000,-/izin
	3) Pemasukan/ pengeluaran hasil perikanan dan kelautan dari dalam atau luar Kabupaten Bekasi	Rp. 250.000,-/izin Rp. 250.000,-/izin
c.	Jasa penggunaan angkutan mobil benih ikan	
d.	Penyediaan benih dan induk ikan dari BBI	Rp. 150.000,-/izin
e.	Izin kios perikanan	25% dari harga dasar Rp. 50.000,-/izin

Pengujian kapal perikanan:		
a. Sampai dengan 5 Gross Tone (GT)		Rp. 15.000,-/kapal/th
b. 5 GT s/d 10 GT		Rp. 30.000,-/kapal/th
Pemakaian tempat singgah nelayan		Rp. 1.000,-/kamar/hari
Tambat kapal di kawasan Pengkalan Pendaratan Ikan (PPI):		
a. <5 GT		Rp. 1.000,-/kapal/hari
b. 5 GT sampai dengan 10 GT		Rp. 1.500,-/kapal/hari
Pelayanan izin usaha perikanan:		
1. Budidaya di laut		
a. Kerang hijau		Rp. 100.000,-/unit/usaha
b. Ikan		Rp. 100.000,-/unit/usaha
2. Budidaya di tambak		
a) Tradisonal		Rp. 100.000,-/ha/usaha
b) Intensif		Rp. 100.000,-/ha/usaha
c) Semi intensif		Rp. 100.000,-/ha/usaha
3. Kolam air tawar		Rp. 50,-/m²/usaha
4. Ikan hias (> 20 aquarium)		Rp. 500,-/aquarium/usaha
5. Jaring apung (> 5 unit)		Rp 2.500,-/kolam/usaha
6. Surat izin penangkapan ikan (masa berlaku izin selama 3 tahun dan dapat dipeRpanjang tiap 3 tahun)		
a) Jaring rampus		Rp. 250,-/piece/usaha
a) Jaring lingkar		Rp. 100.000,-/unit/usaha
b) Jaring insang		Rp. 250,-/piece/usaha
7. Surat izin kapal pengangkut ikan (masa berlaku izin selama 3 tahun dan dapat dipeRpanjang tiap 3 tahun)		
a) Izin kapal penangkap ikan sampai dengan 10 GT		Rp. 10.000,-/unit/usaha
b) Izin kapal perikanan pengangkut dan hasil laut lain		Rp. 50.000,-/unit/usaha
8. Izin pengusaha hasil perikanan (masa berlaku izin selama 3 tahun dan dapat dipeRpanjang tiap 3 tahun)		
a) Pedagang		Rp. 50.000,-/unit/usaha
b) Eksportir		Rp. 150.000,-/unit/usaha
Izin tempat Penampungan Hasil Tambak (TPHT)/ tempat pengumpul hasil perikanan dalam bentuk ikan, rumput laut, udang dan kerang hidup/ segar/ beku/ kering/ olahan		2% dari harga jual

Pasal 115

(1) Setiap orang yang memerlukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 harus mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 116

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 117

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan.

Pasal 118

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 119

(1) Setiao wajib Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.

(3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
a. SKRD;
b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;

(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal120

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatiatau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertuiis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Permohonan izin keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 121

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Bupatiatas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupatitidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal122

(1) Jika permohonan izin keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal123

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal124

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan izin permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 125

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 126

(1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika:

a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
b. wajbi retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

(2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya retribusi.

Pasal 127

(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat terguran.

(3) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal128

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 129

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 130

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 131

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 132

(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Kabupaten Bekasi.

(3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum ditetapkan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 8);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 2 Seri B);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 3 Seri B);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 4 Seri B);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 6 Seri B);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 7 Seri B);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabuapten Bekasi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 14 Seri B);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 4 Seri B);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 5 Seri B);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 18 Seri B);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 2 Seri B);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);

Sepanjang mengatur mengenai retribusi daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI BEKASI

ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 6